



PSKP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan



**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
LITERASI DAN NUMERASI PESERTA DIDIK**

Implementasi Kurikulum Merdeka dan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik

Pengarah:

Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Penanggung Jawab:

Irsyad Zamjani, Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Penyusun:

Irsyad Zamjani | Lukman Solihin | Fransisca Nuraini | Siti Nur Azizah
Hadi Rachmat | Bonifatius Galih K. | Diyan Nur Rakhmah | Joko Purnama
Jaka Aulia Pratama | Emir Wicaksono | Imelda Samosir | Pradhia Rahmadanty

Reviewer:

Anindito Aditomo
Irsyad Zamjani

Penyunting:

Lukman Solihin
Diyan Nur Rakhmah

Foto Sampul:

Lukman Solihin

Tata Letak:

Dwi Pengkik

Pengutipan/Sitasi:

Zamjani, dkk. (2024). *Implementasi Kurikulum Merdeka dan Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik*. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP).

Diterbitkan oleh:

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365 | Faks. +6221-5741664
Website: <https://pskp.kemendikbud.go.id/>
Email: pskp.kemendikbudristek@gmail.com

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel dan Gambar	v
Kata Pengantar	ix
Ringkasan Eksekutif	xi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Pertanyaan Penelitian.....	4
Bab 2 Metode	5
2.1 Desain Penelitian.....	5
2.2 Sumber Data.....	5
2.3 Partisipan Penelitian.....	6
2.4 Teknik Analisis.....	7
Bab 3 Temuan	9
3.1 Sebaran Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka.....	9
3.1.1 Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Jenjang SD/MI/Sederajat.....	10
3.1.2 Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat.....	11
3.1.3 Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Jenjang SMA/MA/Sederajat.....	12
3.1.4 Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat.....	12
3.2 Kualitas Hasil Belajar Sebelum Penerapan Kurikulum Merdeka.....	13
3.2.1 Hasil Belajar Awal pada Jenjang SD/MI/Sederajat.....	13
3.2.2 Hasil Belajar Awal pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat.....	19
3.2.3 Hasil Belajar Awal pada Jenjang SMA/MA/Sederajat.....	24
3.2.4 Hasil Belajar Awal pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat.....	29

3.3	Perubahan Kualitas Hasil Belajar Setelah Penerapan Kurikulum Merdeka	34
3.3.1	Perubahan Kualitas Hasil Belajar pada Jenjang SD/MI/Sederajat.....	35
3.3.2	Perubahan Kualitas Hasil Belajar pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat.....	39
3.3.3	Perubahan Kualitas Hasil Belajar pada Jenjang SMA/MA/Sederajat	44
3.3.4	Perubahan Kualitas Hasil Belajar pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat.....	49
Bab 4	Pembahasan	55
4.1	Sebaran Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka.....	55
4.2	Profil Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Merdeka.....	56
4.3	Perubahan Pascapenerapan Kurikulum Merdeka	59
Bab 5	Rekomendasi Kebijakan	65
Referensi		68

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jenis dan Jumlah Partisipan Penelitian	7
Tabel 3.1	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SD/MI/ Sederajat Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum	13
Tabel 3.2	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SD/MI/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Provinsi	14
Tabel 3.3	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SD/MI/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Jenis Wilayah	16
Tabel 3.4	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SD/MI/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Tingkat Sosial Ekonomi Satuan Pendidikan	17
Tabel 3.5	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SD/MI/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Kelompok Peringkat Hasil Literasi dan Numerasi	18
Tabel 3.6	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum	19
Tabel 3.7	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Provinsi	20
Tabel 3.8	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Jenis Wilayah	22
Tabel 3.9	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Tingkat Sosial Ekonomi Satuan Pendidikan	23

Tabel 3.10	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Kelompok Peringkat Hasil Literasi dan Numerasi	24
Tabel 3.11	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum	25
Tabel 3.12	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Provinsi	25
Tabel 3.13	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Jenis Wilayah	27
Tabel 3.14	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Tingkat Sosial Ekonomi Satuan Pendidikan	28
Tabel 3.15	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Kelompok Peringkat Hasil Literasi dan Numerasi	29
Tabel 3.16	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum	29
Tabel 3.17	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Provinsi	30
Tabel 3.18	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMK/MAK Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Jenis Wilayah	33
Tabel 3.19	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Tingkat Sosial Ekonomi Satuan Pendidikan	33
Tabel 3.20	Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Kelompok Peringkat Hasil Literasi dan Numerasi	34

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Perkembangan Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Merdeka dari Tahun 2021-2023	9
Gambar 3.2	Proporsi Penerapan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Status Satuan Pendidikan Tahun 2023	10
Gambar 3.3	Proporsi Penerapan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Jenis Wilayah Tahun 2023	10
Gambar 3.4	Peta Sebaran Penerapan Kurikulum Merdeka pada Jenjang (a) SD/MI/Sederajat; (b) SMP/MTs/Sederajat; (c) SMA/MA/Sederajat; dan (d) SMK/MAK/Sederajat, Tahun 2023	12
Gambar 3.5	Perubahan Rata-rata Skor Literasi-Numerasi Jenjang SD/MI/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum	35
Gambar 3.6	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SD/MI/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Provinsi	36
Gambar 3.7	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SD/MI/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Jenis Wilayah	37
Gambar 3.8	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SD/MI/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi Sekolah	38
Gambar 3.9	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SD/MI/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Kelompok Peringkat Hasil Belajar Literasi dan Numerasi pada AN 2021	38
Gambar 3.10	Perubahan Rata-rata Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMP/MTs/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum	40
Gambar 3.11	Rata-rata Perubahan Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMP/MTs/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Provinsi	41
Gambar 3.12	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMP/MTs/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Jenis Wilayah	42

Gambar 3.13	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMP/MTs/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi Sekolah	42
Gambar 3.14	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMP/MTs/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Kelompok Peringkat Hasil Belajar Literasi dan Numerasi pada AN 2021	43
Gambar 3.15	Perubahan Rata-rata Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMA/MA/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum	44
Gambar 3.16	Rata-rata Perubahan Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMA/MA/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Provinsi	46
Gambar 3.17	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMA/MA/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Jenis Wilayah	47
Gambar 3.18	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMA/MA/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi Sekolah	47
Gambar 3.19	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMA/MA/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Kelompok Peringkat Hasil Belajar Literasi dan Numerasi pada AN 2021	48
Gambar 3.20	Perubahan Rata-rata Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMK/MAK dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum	49
Gambar 3.21	Rata-rata Perubahan Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMK/MAK dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Provinsi	51
Gambar 3.22	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMK/MAK/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Jenis Wilayah	52
Gambar 3.23	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMK/MAK/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi Sekolah	53
Gambar 3.24	Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMK/MAK/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Kelompok Peringkat Hasil Belajar Literasi dan Numerasi pada AN 2021	54

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar adalah untuk mendorong transformasi pembelajaran, sehingga terjadi peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan. Salah satu strategi penting untuk mencapai tujuan itu, dilakukan melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Melalui fleksibilitas yang ditawarkan, menumbuhkan inisiatif guru dalam melakukan refleksi dan diferensiasi dalam pembelajaran, serta mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi dan karakter peserta didik terbangun dengan baik.

Sejak diterapkan pada 2021 sebagai kurikulum prototipe pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan, kemudian diimplementasikan secara sukarela sejak 2022-2023, lalu ditetapkan sebagai Kurikulum Nasional pada 2024, pelaksana Kurikulum Merdeka telah mencapai 84% dari seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini sengaja diterapkan secara bertahap sesuai kesiapan satuan pendidikan, sehingga tumbuh otonomi dan kepercayaan diri untuk melakukan perubahan. Para guru diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar serta saling berdiskusi dan berbagi melalui komunitas belajar. Implementasi kurikulum ini sekaligus mendorong perubahan dari kebiasaan lama menunggu undangan pelatihan, menjadi aktif mencari dan mempelajari berbagai sumber belajar yang tersedia.

Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi setelah penerapan kurikulum ini, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) melakukan analisis terhadap data Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 dan 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa satuan pendidikan mulai merasakan manfaat dari kurikulum baru ini. Perbaikan kualitas proses belajar pada satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka mulai membuahkan hasil berupa peningkatan capaian hasil belajar. Laporan ini menjadi bukti bahwa Kurikulum Merdeka mampu mendorong perbaikan pembelajaran

dan peningkatan capaian hasil belajar peserta didik. Bukti awal ini dapat menjadi dasar untuk mengupayakan perluasan implementasi Kurikulum Merdeka kepada satuan pendidikan yang belum menerapkannya, serta terus meningkatkan kualitas implementasi kepada satuan pendidikan yang telah mengadopsinya.

Kami berterima kasih kepada para penulis, analis data, dan berbagai pihak yang mendukung penyelesaian laporan ini. Kami berharap agar laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2024

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Anindito Aditomo



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya memulihkan kehilangan pembelajaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sebelum diperparah oleh pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan kerangka kurikulum baru, yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan pada penyederhanaan dengan fokus pada materi-materi esensial, memberikan fleksibilitas kepada guru dalam penerapannya, mendorong refleksi dan pembelajaran berdiferensiasi, serta mengembangkan pembelajaran berbasis proyek dalam rangka penguatan karakter. Pada tahun 2021, prototipe kurikulum ini diterapkan secara terbatas pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Mulai 2022, pemerintah memperluas penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan lain yang bersedia dengan prinsip sukarela dan belajar secara mandiri menggunakan materi yang disediakan di Platform Merdeka Mengajar (PMM) maupun melalui komunitas belajar. Dalam implementasinya, sampai tahun ajaran 2023/2024, kurikulum ini telah diterapkan oleh lebih dari 70% satuan pendidikan. Setelah ditetapkan sebagai kurikulum nasional melalui Permendikbudristek 12/2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, pada tahun ajaran 2024/2025 seluruh satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka meningkat menjadi 84%. Khusus untuk pendidikan formal, seperti SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB pelaksanaannya telah mencapai lebih dari 90% satuan pendidikan.

Studi ini menganalisis perubahan kualitas hasil belajar satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka berdasarkan capaian AN literasi dan numerasi sebelum penerapan kurikulum (AN 2021) dan sesudah penerapannya (AN 2023). Sebagai perbandingan, analisis yang sama juga dilakukan terhadap satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013. Sasaran analisis adalah seluruh populasi satuan pendidikan di Indonesia pada jenjang

pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dari jalur formal maupun nonformal, serta dari jenis umum maupun keagamaan. Analisis deskriptif ini memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi setelah satuan pendidikan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka baik secara nasional, pada level daerah, kelompok wilayah, status satuan pendidikan, status sosial ekonomi, dan performa akademik.

Studi ini mengungkapkan tiga temuan penting.

***Pertama*, peningkatan hasil belajar literasi dan numerasi secara konsisten lebih tinggi pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dibandingkan Kurikulum 2013.**

Hasil AN tahun 2023 menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara konsisten memiliki kemajuan belajar yang lebih baik pada semua jenjang dan kelompok. Selain itu, satuan pendidikan yang lebih lama menerapkan Kurikulum Merdeka cenderung memiliki peningkatan skor yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang menerapkannya lebih belakangan. Kemajuan belajar yang lebih baik pada satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka dapat dikaitkan dengan filosofi dan karakteristik Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penyederhanaan kompleksitas pembelajaran dan fleksibilitas dalam penerapannya. Kurikulum yang lebih sederhana dan fleksibel membantu guru dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih mendalam. Guru didorong untuk lebih profesional dalam menjalankan perannya, memantau perkembangan belajar peserta didik melalui asesmen formatif dan melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi strategi pembelajaran kunci dari Kurikulum Merdeka membuat guru menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kemampuan peserta didik, sehingga setiap peserta didik dapat mengejar ketertinggalannya.

***Kedua*, Kurikulum Merdeka mendorong resiliensi satuan pendidikan dari kelompok yang rentan mengalami ketertinggalan belajar.**

Manfaat sesungguhnya dari penerapan Kurikulum Merdeka ini dirasakan oleh mereka yang paling rentan mengalami ketertinggalan belajar. Studi ini menemukan bahwa manfaat Kurikulum Merdeka secara lebih nyata didapatkan oleh kelompok-kelompok marjinal karena kondisi wilayah maupun status sosial ekonomi. Pada wilayah tertinggal, studi ini menemukan bahwa Kurikulum Merdeka sangat membantu satuan pendidikan untuk belajar jauh lebih baik dibandingkan pengguna Kurikulum 2013. Keandalan

Kurikulum Merdeka dalam mendukung kemajuan belajar yang lebih baik bagi peserta didik juga terlihat dalam konteks perbandingan antarkelompok sosial ekonomi. Secara umum satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dari semua kelompok sosial ekonomi (atas, tengah, dan bawah) di semua jenjang pendidikan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pelaksana Kurikulum 2013. Seperti halnya pada konteks wilayah tertinggal, yang paling banyak memperoleh manfaat dari penerapan Kurikulum Merdeka adalah mereka yang paling rentan, yaitu satuan pendidikan yang berada pada kelompok sosial ekonomi lapisan bawah.

Ketiga, Kurikulum Merdeka membantu mengatasi kesenjangan hasil belajar antarsatuan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar.

Temuan lain yang cukup menjanjikan terkait berkurangnya kesenjangan antarsatuan pendidikan terlihat dari hasil analisis pada kelompok peringkat hasil belajar, khususnya pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Pada jenjang SD/ sederajat, baik untuk skor literasi maupun numerasi, peningkatan tertinggi justru terjadi pada kuartil terbawah, disusul oleh kuartil berikutnya. Pola yang sama terdapat pada peningkatan skor literasi pada jenjang SMP/ sederajat. Selain karena faktor-faktor teknis, seperti efek batas atas di mana mereka yang sudah mendapatkan skor tinggi sulit untuk meningkatkan skor dan mereka yang memiliki skor rendah memiliki ruang peningkatan yang lebih besar, praktik pembelajaran berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka secara alamiah mendorong peningkatan kualitas belajar yang lebih merata pada semua peserta didik.

Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perluasan implementasi Kurikulum Merdeka secara lebih bermakna dan berkualitas agar dampaknya dapat dirasakan oleh lebih banyak lagi satuan pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, di antara hal-hal yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pemahaman dinas pendidikan dan masyarakat penyelenggara satuan pendidikan tentang Kurikulum Merdeka sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan perlu terus ditingkatkan, terutama pada satuan pendidikan swasta yang memiliki tingkat adopsi Kurikulum Merdeka dan rata-rata hasil belajar lebih rendah dibandingkan satuan pendidikan negeri pada semua jenjang. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terkait pentingnya adopsi

Kurikulum Merdeka perlu ditekankan pada dinas pendidikan maupun penyelenggara satuan pendidikan swasta.

2. Pendampingan khusus bagi satuan pendidikan di daerah tertinggal yang kesulitan dalam mendaftar dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Implementasi Kurikulum Merdeka terbukti membantu satuan pendidikan di daerah tertinggal dalam meningkatkan kualitas belajar, namun proporsi satuan pendidikan pelaksananya di daerah tersebut masih sangat terbatas. Satuan pendidikan di beberapa wilayah tertinggal masih terkendala dalam melakukan pendaftaran karena memiliki keterbatasan akses dan informasi. Oleh karena itu, alternatif proses pendaftaran serta sumber belajar yang tersedia secara *offline* menjadi kebutuhan nyata, di samping pendampingan apabila diperlukan. Langkah yang diperlukan adalah memetakan sebaran satuan pendidikan yang masih bertahan menerapkan Kurikulum 2013, memahami kesulitan yang dialami, kemudian memberikan pendampingan asimetris.

3. Dukungan ekosistem untuk peningkatan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya melalui penguatan komunitas belajar dan refleksi perbaikan pembelajaran.

Pada beberapa kasus, satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya mendapat manfaat berupa peningkatan hasil pembelajaran peserta didik. Untuk itu, peningkatan kualitas implementasi kurikulum menjadi penting, sehingga perubahan yang terjadi di satuan pendidikan tidak bersifat superfisial dengan hanya mengubah dokumen kurikulum misalnya, melainkan dapat menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan ekosistem yang mendorong perubahan pembelajaran di tingkat daerah maupun satuan pendidikan. Di tingkat daerah, peran dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan komunitas belajar kepala sekolah dan guru dapat bersinergi dalam mendukung satuan pendidikan bertransformasi menjadi lebih baik. Sementara di tingkat satuan pendidikan, kepemimpinan kepala satuan pendidikan mutlak diperlukan guna memandu transformasi yang diperlukan, melalui perencanaan berbasis data yang memanfaatkan data Rapor Pendidikan, meningkatkan kapasitas guru secara berkala melalui pelatihan maupun komunitas belajar, serta rutin mendorong terjadinya refleksi untuk perbaikan pembelajaran.

1.1 Latar Belakang

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah berhasil meningkatkan partisipasi warga negara ke dalam sistem pendidikan. Pada tingkat sekolah dasar, partisipasi pendidikan telah bersifat universal, sedangkan pada jenjang yang lain tingkat partisipasinya juga terus meningkat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kecakapan literasi melalui pendidikan formal maupun nonformal, telah menurunkan angka buta aksara secara signifikan. Saat ini, penduduk di atas 15 tahun yang sudah melek aksara mencapai 96,53% (BPS, 2023). Artinya, 96 dari 100 penduduk dewasa di Indonesia telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis.

Namun, akses pendidikan yang kian membaik tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Analisis Beatty dkk. (2021) berdasarkan data nasional dari *Indonesia's Family Life Survey* (IFLS) misalnya, menunjukkan bahwa kemampuan Matematika anak-anak Indonesia dari tahun 2000 hingga 2014 terus menurun. Rata-rata anak kelas 7 pada tahun 2014 memiliki skor Matematika yang sama dengan rata-rata anak kelas 4 pada tahun 2000. Hasil Asesmen Nasional (AN) Kemendikbudristek tahun 2021 juga menunjukkan bahwa dalam tes literasi, hanya setengah peserta didik dari seluruh jenjang yang mencapai kompetensi minimum. Sedangkan dalam numerasi, hanya sepertiganya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa bersekolah tidak selalu berarti sama dengan belajar. Salah satu alasan penting yang membuat proses belajar kurang bermakna berakar dari desain kurikulum. Studi Pritchett & Beatty (2015) menunjukkan bahwa banyak sistem pendidikan di Asia dan Afrika yang membuat kurikulum mereka terlalu ambisius. Peserta didik dipaksa menuntaskan materi kurikulum yang sangat padat dalam waktu yang lebih cepat dari kemampuannya belajar dan cara guru mengajar. Akibatnya, peserta didik makin tertinggal dari target kompetensi yang semestinya

dikuasai. Hal ini tidak terkecuali dengan Kurikulum 2013, di mana target kurikulum tidak hanya banyak, tetapi cenderung lebih tinggi dibandingkan target-target internasional. Kajian INOVASI terhadap Kurikulum 2013 mengindikasikan kesenjangan antara pencapaian hasil belajar peserta didik yang diharapkan dengan target kecakapan literasi dan numerasi dalam kerangka kecakapan global (*Global Proficiency Framework/GPF*) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*) (Berry dkk., 2023). Studi ACER juga menemukan bahwa Kurikulum 2013 terlalu ambisius dan tidak sistematis. Misalnya dalam literasi, kerangka Kurikulum 2013 untuk bahasa Indonesia tidak mengartikulasikan keterampilan esensial untuk literasi membaca yang perlu dikembangkan peserta didik agar menjadi pembaca yang baik, seperti kemampuan menyimak, *decoding*, dan membaca pemahaman (mencakup mengingat informasi, menafsirkan, dan merefleksikan teks) (Spink dkk., 2022). Oleh karena itu, kurikulum nasional yang telah dirancang berorientasi pada penguasaan kompetensi yang dibutuhkan peserta didik tidak dapat secara efektif mencapai tujuannya. Hal ini membuat guru juga tidak memiliki waktu untuk melakukan refleksi dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai variasi kemampuan dan kecepatan belajar peserta didiknya.

Dalam upaya memulihkan kehilangan pembelajaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sebelum diperparah oleh pandemi COVID-19, Kemendikbudristek mengembangkan kerangka kurikulum baru, yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan penyederhanaan materi dengan memberikan fokus pada materi-materi esensial yang dapat mengantarkan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan pada setiap fase belajarnya. Dengan target materi yang lebih sederhana, diharapkan guru memiliki keleluasaan untuk memantau perkembangan belajar peserta didik melalui asesmen formatif dan melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar peserta didik, serta mengembangkan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman praktis dalam rangka penguatan karakter.

Penerapan Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap. Pada 2021, prototipe kurikulum ini diterapkan secara terbatas pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Untuk satuan pendidikan pada kedua program ini, pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan khusus dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Pelatihan kurikulum baru ini juga diberikan kepada guru-guru penggerak

yang dirancang sebagai pemimpin perubahan pada satuan pendidikan di setiap daerah. Baik sekolah-sekolah penggerak maupun guru-guru penggerak diharapkan dapat menjadi rujukan utama saat kurikulum baru ini diterapkan secara lebih luas.

Mulai tahun 2022, pemerintah memperluas penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan lain yang bersedia dengan prinsip sukarela dan belajar secara mandiri menggunakan materi yang disediakan di Platform Merdeka Mengajar (PMM) maupun melalui komunitas belajar. Sebelum menerapkan, satuan pendidikan melakukan asesmen diri untuk menganalisis tingkat kesiapannya. Hasil asesmen ini menjadi pertimbangan untuk menentukan pada kategori mana satuan pendidikan akan menerapkan Kurikulum Merdeka: apakah memilih menerapkan beberapa prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka sambil tetap menerapkan konten kurikulum sebelumnya (*Mandiri Belajar*), mulai menerapkan Kurikulum Merdeka secara penuh dengan menggunakan berbagai perangkat ajar yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek (*Mandiri Berubah*), maupun menerapkan kurikulum ini dengan menyusun dan merancang secara mandiri berbagai perangkat ajar yang dibutuhkan (*Mandiri Berbagi*). Sejak tahun 2022 hingga 2023, terdapat lebih dari 180 ribu satuan pendidikan yang memilih menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri di seluruh Indonesia.

Meskipun tidak memberikan pendampingan dan pelatihan secara langsung, pemerintah menyediakan berbagai materi yang dapat dipelajari dan digunakan oleh guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Berbagai materi tersebut tersedia di PMM yang mencakup materi pelatihan daring, modul-modul ajar, hingga contoh-contoh praktik baik pembelajaran yang diunggah oleh para guru sendiri. Kemendikbudristek juga menyelenggarakan berbagai seri webinar Kurikulum Merdeka untuk menguatkan pemahaman mengenai konsep dan praktik penerapan kurikulum. Selain itu, pemerintah juga mendorong kepala satuan pendidikan dan para guru untuk mengaktifkan berbagai komunitas belajar sebagai tempat belajar dan berbagi bersama.

Implementasi secara mandiri dan sukarela ini ditujukan agar satuan pendidikan dan guru memiliki kesadaran untuk memanfaatkan otonomi yang diberikan, sehingga tumbuh *agency* dan pemberdayaan diri dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Dengan memberikan keleluasaan, satuan pendidikan dan guru melakukan *sensemaking* terhadap kebijakan kurikulum baru dan dapat menyesuaikan dengan konteks satuan pendidikan mereka. Memberikan otonomi serta mendorong *agency* kepada satuan pendidikan

dan guru, terbukti lebih efektif dibandingkan kebijakan *top-down* yang kurang memperhatikan kondisi, situasi, serta konteks satuan pendidikan (OECD, 2020).

1.2 Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk:

- Menggambarkan profil satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2021/2022, 2022/2023, dan 2023/2024.
- Mengevaluasi dampak implementasi Kurikulum Merdeka terhadap kualitas hasil belajar peserta didik.

Kajian ini akan menjawab tiga pertanyaan penelitian, yaitu:

- Bagaimana sebaran satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka berdasarkan jenjang pendidikan, status satuan pendidikan, dan wilayah?
- Bagaimana gambaran profil satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka berdasarkan hasil AN literasi dan numerasi?
- Bagaimana dampak dari implementasi Kurikulum Merdeka dilihat dari perubahan capaian hasil belajar yang tergambar melalui hasil AN literasi dan numerasi?

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif untuk melihat perubahan yang terjadi setelah penerapan Kurikulum Merdeka selama tahun 2021 hingga 2023. Penelitian dilakukan dengan metode analisis data sekunder yang diperoleh dari hasil AN dan berbagai data pendidikan lain yang relevan. Perubahan pascapenerapan Kurikulum Merdeka tersebut diukur berdasarkan capaian AN (literasi dan numerasi) dari satuan pendidikan pelaksana pada periode sebelum dan sesudah penerapan kurikulum. Untuk mengontrol efek perubahan yang terjadi, analisis yang sama juga dilakukan terhadap satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013. Sasaran analisis adalah seluruh populasi satuan pendidikan.

2.2 Sumber Data

Studi ini dilakukan melalui analisis kuantitatif terhadap beberapa set data, yaitu:

1) Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Data pokok pendidikan merupakan basis data menyangkut kondisi satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Data pokok pendidikan diperbarui setiap tahun pada akhir tahun ajaran baru. Pembaruan dilakukan oleh operator masing-masing satuan pendidikan dan secara reguler Kemendikbudristek melakukan validasi lapangan melalui sampel acak.

2) Hasil Asesmen Nasional (AN)

AN merupakan evaluasi terhadap kinerja sistem pendidikan yang dilakukan setiap tahun kepada seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Evaluasi AN dilakukan untuk menilai capaian hasil belajar literasi dan numerasi peserta didik melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) literasi dan numerasi, hasil belajar karakter peserta didik melalui Survei Karakter (SK), dan kondisi lingkungan belajar satuan pendidikan melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar). AN menyasar peserta didik dari kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih

berdasarkan sampel acak untuk berpartisipasi dalam AKM, SK, dan Sulingjar. Adapun jumlah peserta didik yang ditetapkan sebagai sampel AN pada setiap satuan pendidikan adalah 30 peserta didik untuk SD/ sederajat dan 45 peserta didik untuk SMP/ SMA/ sederajat. Bagi satuan pendidikan di mana peserta didik kelas 5, 8, dan 11 berjumlah di bawah ketentuan jumlah sampel, maka yang menjadi peserta AN adalah semua peserta didik yang tersedia.

Selain peserta didik, kepala satuan pendidikan dan semua pendidik juga berpartisipasi dalam pengisian Sulingjar. Adapun data hasil AN yang dianalisis dalam studi ini adalah hasil AKM literasi dan numerasi peserta didik. AKM literasi menilai kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan berinteraksi dengan teks tertulis dalam upaya meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya, sehingga dapat berpartisipasi secara optimal sebagai warga masyarakat. Sedangkan AKM numerasi menilai kemampuan peserta didik dalam menggunakan pengetahuan Matematika yang dimilikinya untuk menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Data Lainnya

Untuk keperluan mengelompokkan satuan pendidikan berdasarkan tahun pelaksanaan Kurikulum Merdeka, digunakan data Keputusan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen tentang penetapan satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak, Keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi tentang penetapan satuan pendidikan pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan, serta Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tentang satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka. Sementara untuk mengelompokkan daerah tertinggal dan nontertinggal, didasarkan pada Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Sebagai pendukung analisis, studi ini juga menggunakan data dari hasil evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri yang dilakukan melalui studi kualitatif pada tahun 2022 dan 2023. Beberapa data kualitatif ini terutama digunakan sebagai bahan analisis lebih lanjut pada bagian pembahasan.

2.3 Partisipan Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk melihat data sebaran satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Untuk analisis lebih lanjut terkait capaian data Asesmen Nasional di masing-masing kelompok, maka partisipan penelitian ini adalah satuan pendidikan dan peserta didik yang

mengikuti AN pada 2021 dan 2023 dengan kategori partisipasi memadai. Satuan pendidikan tersebut meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat, dan SMK/MAK/ sederajat. Adapun informasi lebih rinci mengenai partisipan penelitian disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Jenis dan Jumlah Partisipan Penelitian

Jenjang	Jenis Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta Didik
SD/ sederajat	SD	137.657	23.179.088
	MI/Keagamaan	20.310	3.973.613
	SDLB	435	23.245
	Paket A/Ula	599	34.030
SMP/ sederajat	SMP	36.512	9.674.761
	MTs/Keagamaan	14.336	3.392.613
	SMPLB	422	11.445
	Paket B/Wustha	2.725	303.222
SMA/ sederajat	SMA	12.112	4.845.971
	MA/Keagamaan	6.598	1.400.107
	SMALB	365	9.999
	Paket C/Ulya	3.007	479.277
SMK/MAK	SMK	11.469	4.968.748
	MAK	2	275

2.4 Teknik Analisis

Analisis yang dilakukan mencakup analisis kuantitatif deskriptif pada seluruh satuan pendidikan. Artinya, analisis ini dilakukan pada populasi satuan pendidikan, bukan berdasarkan sampel yang hasilnya perlu digeneralisasi melalui inferensi statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi setelah implementasi Kurikulum Merdeka baik secara nasional, pada level daerah, kelompok wilayah, status satuan pendidikan, status sosial ekonomi, dan performa akademik. Adapun satuan pendidikan yang dianalisis dalam studi ini mencakup satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah, dari jalur formal maupun nonformal, status negeri maupun swasta, serta dari jenis umum maupun madrasah.

Tahap pertama dari proses analisis adalah integrasi dan klasifikasi data. Kami menyatukan seluruh data menggunakan kode unik identitas satuan pendidikan, yaitu Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN). Integrasi dan klasifikasi data tersebut dilakukan melalui pemadanan jenis kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Data tersebut kemudian

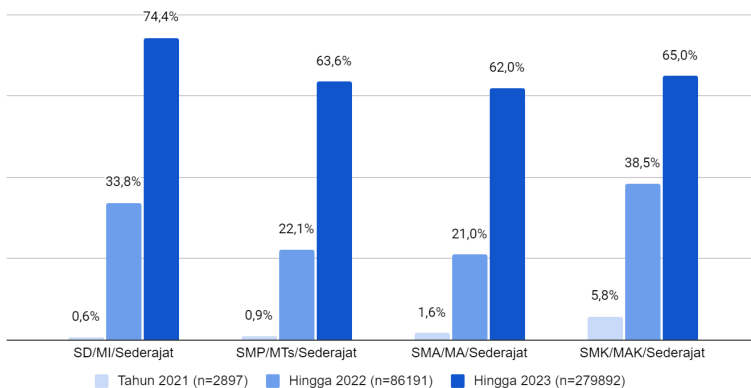
digunakan untuk melakukan analisis deskriptif sebaran pelaksana kurikulum merdeka. Selanjutnya, data yang telah diintegrasikan, dibersihkan dengan mengeluarkan satuan pendidikan yang memiliki nilai AN kosong atau memiliki partisipasi yang tidak memadai dalam AN. Partisipasi AN dianggap memadai jika minimum 85% dari jumlah peserta didik yang menjadi target sampel di setiap satuan pendidikan berpartisipasi dalam AN. Data dengan kategori memadai inilah yang digunakan untuk melakukan analisis deskriptif profil hasil belajar awal pelaksana Kurikulum Merdeka dan perubahan hasil belajar setelah menerapkan Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, karena penelitian ini membandingkan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah penerapan Kurikulum Merdeka, maka dalam tahap ini juga dilakukan pemasangan data.

Tahap kedua dari proses analisis adalah melakukan analisis deskriptif terkait sebaran pelaksana Kurikulum Merdeka, profil hasil belajar awal pelaksana Kurikulum Merdeka, dan perubahan hasil belajar setelah menerapkan Kurikulum Merdeka. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan mempertimbangkan variasi jenjang pendidikan, status satuan pendidikan, wilayah administratif, kategori wilayah, status sosial ekonomi, dan peringkat hasil belajar. Untuk melihat manfaat kurikulum, seluruh analisis dilakukan dengan membuat perbandingan antara pelaksana Kurikulum Merdeka dan pengguna Kurikulum 2013. Lebih jauh, mengingat pelaksanaan Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan, perbandingan juga dilakukan antara pelaksana Kurikulum Merdeka periode pertama sejak 2021 (KM 3 tahun), periode kedua sejak 2022 (KM 2 tahun), dan periode ketiga sejak 2023 (KM 1 tahun).

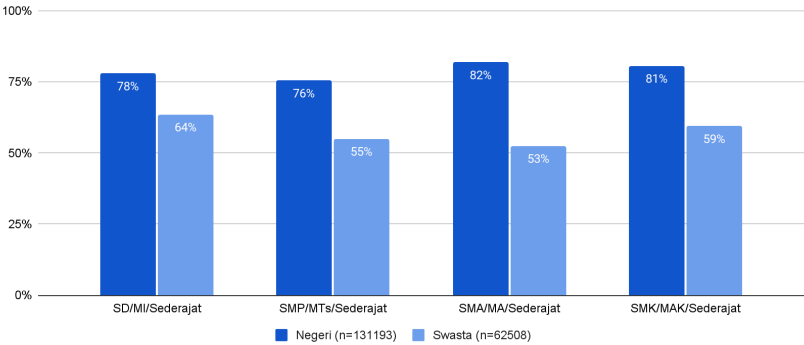
Tahap ketiga dan terakhir dari proses analisis adalah interpretasi terhadap hasil analisis kuantitatif. Pada tahap ini, dilakukan penautan (*linking*) analisis kualitatif dengan analisis kuantitatif untuk memberi makna dan penjelasan lebih dalam terhadap data dan hasil analisis yang telah diuraikan (Irwin, 2008). Analisis kualitatif ini terutama untuk memberi jawaban eksplanatoris atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apa yang membuat pengguna Kurikulum Merdeka terkonsentrasi di daerah tertentu dan faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan hasil belajar dari kelompok tertentu. Interpretasi ini melibatkan sintesis dengan berbagai teori, literatur, dan studi yang pernah ada sebelumnya. Dengan adanya interpretasi ini, pemahaman dan pengambilan kesimpulan yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dari hasil studi ini dapat diperoleh secara lebih objektif dan komprehensif.

3.1 Sebaran Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka

Sejak dirilis pada 2021 sebagai kurikulum prototipe untuk program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan yang kemudian menjadi Kurikulum Merdeka dan diterapkan secara mandiri pada 2022, adopsi terhadap Kurikulum Merdeka terus meningkat. Pada 2021, terdapat 2.897 satuan pendidikan yang menerapkan prototipe Kurikulum Merdeka melalui satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Pada 2022, jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 80 ribu satuan pendidikan. Sebagian besar di antaranya adalah satuan pendidikan yang melaksanakan secara mandiri. Pada 2023, pelaksana Kurikulum Merdeka bertambah lagi menjadi 193.701 satuan pendidikan, yang merupakan 66,2% dari seluruh satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan SMK/ sederajat. Sebagai catatan, proporsi satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka ini mencakup perhitungan untuk madrasah, sehingga berbeda dari yang pernah disampaikan oleh Kemendikbudristek dalam komunikasi publik sebelumnya yang berfokus pada satuan pendidikan umum (nonkeagamaan).

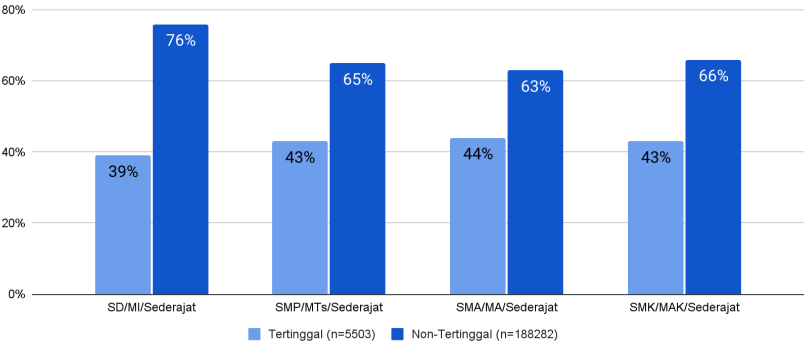


Gambar 3.1 Perkembangan Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Merdeka dari Tahun 2021-2023.



Gambar 3.2 Proporsi Penerapan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Status Satuan Pendidikan Tahun 2023.

Dilihat dari status satuan pendidikan, adopsi Kurikulum Merdeka lebih cepat terjadi pada satuan pendidikan negeri dibanding swasta. Dari sebaran geografis, pelaksanaan Kurikulum Merdeka lebih cepat terjadi di daerah perkotaan, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatra. Adopsi Kurikulum Merdeka juga lebih cepat terjadi di daerah-daerah nontertinggal.



Gambar 3.3 Proporsi Penerapan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Jenis Wilayah Tahun 2023.

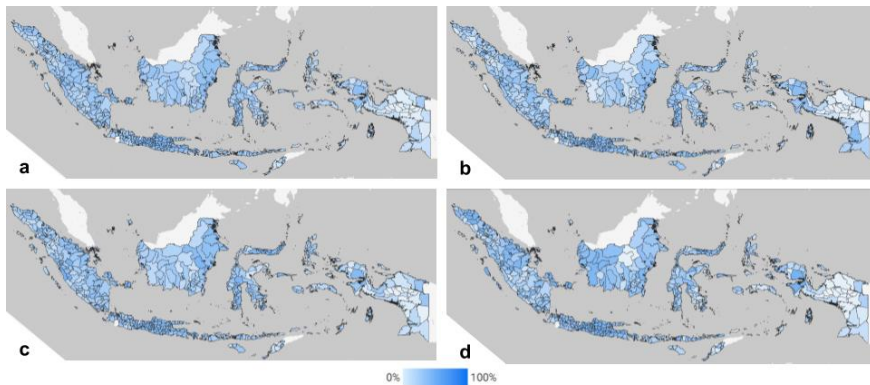
3.1.1 Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Jenjang SD/MI/Sederajat

Sampai tahun 2023, untuk SD/ sederajat, penerapan Kurikulum Merdeka telah menjangkau 74% satuan pendidikan secara nasional, paling besar dibandingkan jenjang lainnya. Berdasarkan status satuan pendidikan, kurikulum ini telah diterapkan oleh 102.412 (78%) satuan pendidikan negeri

dan 27.582 (64%) satuan pendidikan swasta. Satuan pendidikan SD/ sederajat di wilayah Pulau Jawa menjadi yang paling banyak menerapkan Kurikulum Merdeka. Kecuali di dua wilayah provinsi, tingkat penerapan Kurikulum Merdeka pada SD/ sederajat di Pulau Jawa rata-rata di atas 80%. Sementara itu, di sebagian besar wilayah lain di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, penerapan Kurikulum Merdeka secara umum juga menjangkau lebih dari separuh satuan pendidikan, berkisar antara 50% hingga 90%. Kawasan yang penerapannya masih cukup rendah terutama di wilayah Maluku dan Papua, berkisar antara 3% hingga 48%. Gambaran ini cukup konsisten jika pengelompokan wilayah dilakukan berdasarkan daerah tertinggal dan nontertinggal. Penerapan Kurikulum Merdeka hanya menjangkau 39% SD/ sederajat di daerah-daerah tertinggal, di mana Papua dan Maluku menjadi konstituen terbesarnya. Sementara di daerah nontertinggal, penerapan Kurikulum Merdeka telah melingkupi 76% SD/ sederajat (Gambar 3.4.a).

3.1.2 Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Jenjang SMP/MTs/ Sederajat

Sementara itu, pada jenjang SMP/ sederajat hingga tahun 2023, penerapan Kurikulum Merdeka telah menjangkau 64% satuan pendidikan secara nasional. Dari jumlah tersebut, 19.791 (75%) satuan pendidikan negeri dan 21.236 (50%) satuan pendidikan swasta telah menerapkan kurikulum ini. Pada Gambar 3.4.b terlihat bahwa penerapan Kurikulum Merdeka untuk tingkat SMP/ sederajat paling banyak berada di Pulau Jawa-Bali dengan rata-rata mencapai angka 70%. Sementara di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, secara umum penerapan Kurikulum Merdeka telah mencapai rata-rata 58%. Sedangkan di Pulau Nusa Tenggara dan Papua, penerapannya masih cukup rendah dengan rata-rata kurang dari 50%. Sementara itu, berdasarkan karakteristik wilayah, implementasi Kurikulum Merdeka telah menjangkau 43% SMP/ sederajat di daerah-daerah tertinggal, dengan SMP/ sederajat yang berada di Pulau Papua dan Maluku menjadi bagian terbesarnya. Proporsi ini lebih rendah dibandingkan penerapan Kurikulum Merdeka di daerah nontertinggal yang telah mencapai 65% SMP/ sederajat.



Gambar 3.4 Peta Sebaran Penerapan Kurikulum Merdeka pada Jenjang (a) SD/MI/Sederajat; (b) SMP/MTs/Sederajat; (c) SMA/MA/Sederajat; dan (d) SMK/MAK/Sederajat, Tahun 2023.

3.1.3 Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Jenjang SMA/MA/Sederajat

Selanjutnya, penerapan Kurikulum Merdeka pada jenjang SMA/ sederajat sampai tahun 2023 telah menjangkau 60% satuan pendidikan secara nasional. Dari jumlah tersebut, 6.478 (81%) satuan pendidikan negeri dan 8.830 (48%) satuan pendidikan swasta telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Pada Gambar 3.4.c terlihat bahwa penerapan Kurikulum Merdeka untuk tingkat SMA/ sederajat paling banyak berada di Pulau Jawa-Bali dengan rata-rata 68%. Sementara di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi secara umum penerapan Kurikulum Merdeka telah mencapai rata-rata 59%. Sedangkan di Pulau Nusa Tenggara dan Papua, penerapannya masih cukup rendah dengan rata-rata kurang dari 50%. Berdasarkan kategori wilayah, implementasi Kurikulum Merdeka telah menjangkau 42% SMA/ sederajat di daerah-daerah tertinggal. Sedangkan di daerah nontertinggal, penerapan Kurikulum Merdeka menjangkau sebesar 59% SMA/ sederajat.

3.1.4 Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat

Penerapan Kurikulum Merdeka untuk jenjang SMK/ sederajat sampai tahun 2023 telah menjangkau 65% satuan pendidikan secara nasional. Jumlah tersebut terdiri dari 3.032 (81%) satuan pendidikan negeri dan 6.355 (59%) satuan pendidikan swasta yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Pada Gambar 3.4.d terlihat bahwa penerapan Kurikulum Merdeka untuk tingkat SMK/ sederajat paling banyak berada di Pulau Jawa-Bali dengan rata-rata mencapai 71%. Sementara di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi secara umum penerapan Kurikulum Merdeka telah mencapai rata-rata 67%.

Sedangkan di Pulau Nusa Tenggara dan Papua, penerapannya masih cukup rendah dengan rata-rata kurang dari 50%. Implementasi Kurikulum Merdeka telah menjangkau 43% SMK/ sederajat di daerah-daerah tertinggal, dengan SMK/ sederajat yang berada di Pulau Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara masih menjadi konstituen terbesarnya. Sedangkan di daerah nontertinggal, penerapan Kurikulum Merdeka telah melingkupi 66% SMK/ sederajat.

3.2 Kualitas Hasil Belajar Sebelum Penerapan Kurikulum Merdeka

Sebelum melihat manfaat Kurikulum Merdeka dalam perubahan hasil belajar peserta didik pada satuan pendidikan yang menerapkannya, kita perlu terlebih dahulu melihat kondisi hasil belajar sebelum kurikulum baru ini diterapkan oleh satuan pendidikan. Hasil belajar ini dapat kita amati dari capaian AN untuk literasi dan numerasi di satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka pada tahun 2021. Oleh karena kurikulum ini telah diterapkan selama tiga tahun, kita dapat melihat perbandingan hasil belajar awal antara satuan pendidikan yang mulai menerapkan Kurikulum Merdeka dalam tiga periode tersebut dan satuan pendidikan yang masih menggunakan Kurikulum 2013.

3.2.1 Hasil Belajar Awal pada Jenjang SD/MI/ Sederajat

Pada jenjang SD/ sederajat secara nasional, satuan pendidikan yang lebih awal menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki kualitas hasil belajar yang lebih baik dibandingkan pelaksana Kurikulum 2013. Lama penerapan kurikulum juga berkaitan dengan kualitas hasil belajar. Satuan pendidikan yang lebih awal menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki rata-rata skor hasil belajar yang lebih baik dibandingkan satuan pendidikan yang menerapkannya lebih belakangan. Apalagi jika dibandingkan dengan satuan pendidikan yang masih menerapkan Kurikulum 2013.

Tabel 3.1 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SD/MI/ Sederajat Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum

Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
		Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Literasi 2021	45,1	48,8	52,6	54,8
Numerasi 2021	33,2	34,9	36,8	37,6

Untuk literasi, satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun (sejak 2021) memiliki rata-rata skor AN 2021 sebesar 54,8,

sedangkan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka dua tahun (sejak 2022) memiliki skor 52,6, serta yang melaksanakan Kurikulum Merdeka satu tahun (sejak 2023) memiliki skor 48,8, dan yang masih melaksanakan Kurikulum 2013 memiliki skor 45,1. Pola yang sama terjadi pada hasil belajar numerasi, namun dengan skor yang berbeda. Pengguna Kurikulum Merdeka selama tiga tahun memiliki rata-rata skor numerasi AN 2021 tertinggi yaitu 37,6, diikuti oleh pengguna selama dua tahun sebesar 36,8, pengguna selama satu tahun 34,9, dan yang terendah adalah pengguna Kurikulum 2013, yaitu sebesar 33,2. Skor dibuat dalam skala 0-100 (Tabel 3.1).

Secara umum, pola yang sama juga terjadi jika melihat sebaran hasil belajar awal berdasarkan provinsi. Variasi terjadi pada besaran dan selisih skor di antara jenis dan durasi penerapan kurikulum oleh satuan pendidikan. Pada provinsi A, misalnya, terdapat selisih skor literasi rata-rata sekitar 1 poin antara satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka pada setiap tahun yang berbeda. Jika dibandingkan dengan pelaksana Kurikulum 2013, selisihnya lebih tinggi. Sedangkan pada provinsi E, rata-rata selisihnya mencapai kisaran 4 poin (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SD/MI/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Provinsi

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Nasional	Literasi	45,1	48,8	52,6	54,8
	Numerasi	33,2	34,9	36,8	37,6
Provinsi A	Literasi	53,1	59,4	61,3	62,2
	Numerasi	35,3	39,4	40,3	39,7
Provinsi B	Literasi	42,2	46,2	49,4	55,4
	Numerasi	31,2	32,6	34,4	36,7
Provinsi C	Literasi	49,5	51,9	56,5	60,5
	Numerasi	35,5	36,4	39,3	40,6
Provinsi D	Literasi	41,7	43,5	44,6	50,1
	Numerasi	31,5	32,4	32,7	34,6
Provinsi E	Literasi	38,0	41,0	46,1	49,3
	Numerasi	28,9	30,7	33,0	33,8
Provinsi F	Literasi	42,0	40,8	41,8	47,9
	Numerasi	31,9	30,7	31,3	32,6
Provinsi G	Literasi	48,3	51,0	53,4	57,2
	Numerasi	33,7	35,0	36,1	38,0

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Provinsi H	Literasi	47,6	50,9	51,9	52,3
	Numerasi	34,6	35,2	36,6	36,9
Provinsi I	Literasi	49,4	51,5	54,7	56,6
	Numerasi	35,3	35,6	38,0	37,9
Provinsi J	Literasi	45,3	47,9	50,0	58,8
	Numerasi	33,7	35,3	36,4	40,9
Provinsi K	Literasi	50,3	50,5	53,9	60,2
	Numerasi	35,2	35,3	37,3	40,7
Provinsi L	Literasi	46,7	50,1	51,2	57,0
	Numerasi	33,9	35,3	36,6	37,4
Provinsi M	Literasi	42,5	44,9	46,1	50,7
	Numerasi	31,8	33,1	34,0	36,2
Provinsi N	Literasi	34,7	38,3	41,9	36,5
	Numerasi	26,9	28,8	30,6	27,4
Provinsi O	Literasi	46,9	50,7	52,4	55,5
	Numerasi	32,3	34,1	35,0	36,7
Provinsi P	Literasi	55,4	56,7	59,1	61,6
	Numerasi	37,0	37,5	38,5	40,0
Provinsi Q	Literasi	40,2	43,4	42,2	44,6
	Numerasi	30,3	32,1	31,3	31,3
Provinsi R	Literasi	48,1	50,3	53,8	55,0
	Numerasi	33,6	35,1	36,6	35,4
Provinsi S	Literasi	45,7	46,8	48,4	55,1
	Numerasi	33,6	34,1	34,3	37,5
Provinsi T	Literasi	42,7	49,6	48,6	46,8
	Numerasi	31,4	34,1	32,9	32,8
Provinsi U	Literasi	44,9	46,5	47,8	54,3
	Numerasi	33,3	34,3	35,3	39,3
Provinsi V	Literasi	44,4	46,2	49,1	48,3
	Numerasi	31,9	33,0	34,7	32,3
Provinsi W	Literasi	58,8	59,8	60,2	64,8
	Numerasi	39,3	39,7	39,5	41,8
Provinsi X	Literasi	41,1	45,3	46,4	48,2
	Numerasi	30,4	32,4	32,0	32,6
Provinsi Y	Literasi	39,4	39,9	39,5	54,3
	Numerasi	30,4	30,5	30,8	40,7

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Provinsi Z	Literasi	39,3	42,8	44,5	44,5
	Numerasi	29,4	31,6	32,1	32,6
Provinsi AA	Literasi	40,6	42,9	45,3	49,7
	Numerasi	30,2	31,5	32,7	33,6
Provinsi AB	Literasi	47,6	51,2	52,5	54,7
	Numerasi	34,9	36,5	37,4	38,2
Provinsi AC	Literasi	44,1	47,7	53,3	49,6
	Numerasi	32,4	33,8	36,7	34,0
Provinsi AD	Literasi	40,6	44,5	46,1	49,9
	Numerasi	30,3	33,6	33,1	32,9
Provinsi AE	Literasi	38,8	44,0	47,2	51,6
	Numerasi	29,5	31,6	33,2	34,5
Provinsi AF	Literasi	43,1	45,4	45,9	48,4
	Numerasi	32,7	33,9	33,8	34,6
Provinsi AH	Literasi	39,0	41,3	44,4	48,8
	Numerasi	29,8	30,6	32,0	35,1
Provinsi AI	Literasi	42,0	44,9	45,6	45,5
	Numerasi	31,5	33,1	33,2	32,8

Meskipun demikian, pada sebagian kecil wilayah provinsi, terdapat sejumlah kasus yang tidak sejalan dengan kecenderungan umum. Pada provinsi F, misalnya, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 memiliki rata-rata skor literasi dan numerasi AN 2021 yang sedikit lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka pada tahun 2022 dan 2023. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021, pelaksana Kurikulum 2013 di provinsi tersebut tetap memiliki rata-rata skor literasi AN 2021 yang lebih rendah hingga 5,9 poin.

Tabel 3.3 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SD/MI/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Jenis Wilayah

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Daerah Tertinggal	Literasi 2021	38,5	40,2	43,2	42,3
	Numerasi 2021	29,2	30,3	31,8	30,8
Daerah Nontertinggal	Literasi 2021	45,6	49,1	52,7	55,1
	Numerasi 2021	33,5	35,0	36,9	37,7

Sementara itu, berdasarkan kategori wilayah, baik di daerah tertinggal maupun nontertinggal, hasil belajar awal untuk satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 secara konsisten mengikuti pola nasional (Tabel 3.3). Satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka untuk semua durasi penerapan memiliki rata-rata skor AN 2021 yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013. Pada wilayah nontertinggal, di antara satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka, durasi penerapan kurikulum mencerminkan kualitas hasil belajar satuan pendidikan tersebut. Makin awal menerapkan Kurikulum Merdeka, maka makin terlihat bahwa satuan pendidikan tersebut lebih siap. Akan tetapi, pola ini tidak sepenuhnya berlaku di daerah tertinggal, khususnya untuk literasi. Skor literasi AN 2021 pada pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2022 sedikit lebih tinggi dibandingkan skor literasi pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2023 dan 2021.

Tabel 3.4 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SD/MI/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Tingkat Sosial Ekonomi Satuan Pendidikan

Tingkat Sosial Ekonomi	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
20% atas	Literasi 2021	49,1	52,5	56,2	57,6
	Numerasi 2021	34,8	36,4	38,3	38,7
60% tengah	Literasi 2021	45,7	48,6	51,7	53,8
	Numerasi 2021	33,5	34,8	36,5	37,3
20% bawah	Literasi 2021	41,0	43,2	45,8	44,9
	Numerasi 2021	31,2	32,4	33,8	32,9

Banyak literatur menganggap bahwa kemampuan sosial ekonomi dapat menjelaskan kemampuan hasil belajar. Makin tinggi tingkat sosial ekonomi, maka kian baik hasil belajarnya. Dengan menggunakan indeks sosial ekonomi satuan pendidikan yang diperoleh dari data AN, ditemukan bahwa teori tersebut secara umum terkonfirmasi. Satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 yang berasal dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi memiliki skor literasi dan numerasi AN 2021 yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan dari kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka juga terlihat memiliki skor yang lebih baik dibandingkan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 pada semua tingkat sosial ekonomi (Tabel 3.4).

Tabel 3.5 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SD/MI/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Kelompok Peringkat Hasil Literasi dan Numerasi

Kelompok Peringkat Hasil belajar	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
		Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Kuartil Literasi SD/MI/Sederajat (2021)				
Kuartil Pertama	58,1	61,1	64,6	66,5
Kuartil Kedua	46,7	50,3	54,5	54,8
Kuartil Ketiga	39,5	43,4	47,8	47,8
Kuartil Keempat	30,1	33,9	37,9	38,1
Kuartil Numerasi SD/MI/Sederajat (2021)				
Kuartil Pertama	42,1	43,2	45,4	45,2
Kuartil Kedua	33,6	35,2	37,1	37,4
Kuartil Ketiga	29,7	31,5	33,4	33,4
Kuartil Keempat	24,3	26,5	28,6	28,6

Analisis juga dilakukan untuk melihat hasil belajar awal berdasarkan empat kelompok peringkat hasil literasi dan numerasi, dari yang tertinggi (kuartil pertama) hingga terendah (kuartil keempat). Hal ini nantinya digunakan untuk melihat apakah Kurikulum Merdeka hanya bermanfaat bagi kelompok peringkat tertentu saja atau di seluruh peringkat hasil belajar siswa. Pada hampir semua kelompok peringkat hasil belajar, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka memiliki hasil belajar awal yang lebih baik dibandingkan satuan pendidikan yang masih menerapkan Kurikulum 2013. Variasi polanya hanya terdapat di dalam satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sendiri, terutama pada hasil belajar numerasi.

Secara umum, satuan pendidikan yang lebih lama menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki hasil belajar awal yang lebih baik, namun terdapat sedikit perbedaan untuk skor numerasi pada kelompok kuartil teratas. Satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021 memiliki skor numerasi pada AN 2021 yang sedikit lebih rendah (45,2) dibandingkan satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2022 (45,4) (Tabel 3.5). Jika dilihat lebih lanjut, untuk satuan pendidikan yang berada pada peringkat capaian literasi dan numerasi di kelompok 25% terbawah (kuartil keempat), satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2022 (dua tahun implementasi) memiliki skor yang relatif sama dengan satuan pendidikan yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021.

3.2.2 Hasil Belajar Awal pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat

Pada jenjang SMP/ sederajat, satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum Merdeka juga memiliki hasil skor AN (literasi dan numerasi) yang lebih baik dibandingkan satuan pendidikan yang masih menggunakan Kurikulum 2013. Namun, sedikit berbeda dengan kondisi di jenjang SD/ sederajat, dari data nasional di jenjang SMP/ sederajat diketahui bahwa satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021 terlihat memiliki skor AN 2021 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan satuan pendidikan yang menerapkannya sejak 2022 (Tabel 3.6), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan dengan satuan pendidikan yang baru menerapkannya pada 2023.

Tabel 3.6 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum

Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
		Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Literasi 2021	55,9	61,0	65,7	64,7
Numerasi 2021	51,9	53,7	55,3	55,2

Pada capaian literasi AN 2021, satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka sejak 2022 memiliki skor paling tinggi, yaitu 65,7. Sedangkan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021 memiliki skor 64,7 dan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka sejak 2023 memiliki skor 61,0. Sementara satuan pendidikan yang masih melaksanakan Kurikulum 2013 memiliki skor awal paling rendah, yaitu 55,9. Pola tersebut juga terjadi pada capaian numerasi dengan besaran skor yang berbeda.

Meskipun demikian, pola skor literasi dan numerasi secara nasional tersebut tidak seluruhnya berlaku jika dilihat berdasarkan sebaran provinsinya (Tabel 3.7). Pada beberapa provinsi, lamanya durasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka berkaitan dengan kualitas skor literasi dan numerasi. Pada provinsi C, misalnya, skor literasi pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021 adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan pelaksana tahun 2022 ataupun 2023. Skor literasi pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2021 sebesar 70,0, sedangkan pelaksana tahun 2022 adalah 68,8, pelaksana tahun 2023 memiliki skor 64,5, dan pelaksana Kurikulum 2013 memiliki skor 57,9.

Meskipun begitu, pada sebagian kecil provinsi lainnya (misalnya provinsi K dan L) ditemukan pola skor yang berbeda, di mana meskipun satuan

pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021 memiliki skor literasi AN 2021 yang paling tinggi dibandingkan pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2022, 2023, maupun Kurikulum 2013, namun tidak diikuti oleh pola skor numerasi di tahun implementasi yang sama. Pada provinsi K misalnya, skor literasi AN 2021 paling tinggi terjadi pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2021 (67,8), namun skor numerasi AN 2021 paling tinggi diperoleh satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2022 (56,0).

Tabel 3.7 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Provinsi

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Nasional	Literasi	55,9	61,0	65,7	64,7
	Numerasi	51,9	53,7	55,3	55,2
Provinsi A	Literasi	69,5	74,0	75,3	72,6
	Numerasi	55,9	58,3	59,2	57,1
Provinsi B	Literasi	55,7	59,1	62,8	56,9
	Numerasi	51,4	53,0	53,7	52,1
Provinsi C	Literasi	57,9	64,5	68,8	70,0
	Numerasi	52,5	54,9	56,6	57,1
Provinsi D	Literasi	52,6	55,4	55,7	48,3
	Numerasi	50,6	52,1	52,3	49,8
Provinsi E	Literasi	48,0	52,2	59,4	57,7
	Numerasi	49,9	50,9	52,6	52,6
Provinsi F	Literasi	50,3	55,4	55,2	57,7
	Numerasi	50,9	52,4	52,4	53,0
Provinsi G	Literasi	59,2	64,1	64,4	68,1
	Numerasi	52,3	54,2	54,6	55,9
Provinsi H	Literasi	57,8	61,5	62,9	60,5
	Numerasi	52,5	53,5	53,8	53,2
Provinsi I	Literasi	61,2	64,7	66,7	69,5
	Numerasi	52,6	54,9	55,5	56,2
Provinsi J	Literasi	54,0	59,0	65,5	62,5
	Numerasi	51,4	53,2	55,2	54,7
Provinsi K	Literasi	61,4	64,7	67,5	67,8
	Numerasi	54,0	54,9	56,0	55,8
Provinsi L	Literasi	58,0	62,1	61,1	57,7
	Numerasi	52,3	53,7	53,0	53,4

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Provinsi M	Literasi	50,5	55,2	56,1	53,2
	Numerasi	49,8	51,6	52,0	51,3
Provinsi N	Literasi	47,7	50,7	57,1	61,9
	Numerasi	49,2	50,5	52,4	54,0
Provinsi O	Literasi	59,5	64,2	67,7	62,2
	Numerasi	52,8	54,3	55,6	54,1
Provinsi P	Literasi	65,8	69,0	69,5	74,2
	Numerasi	54,3	55,8	56,4	57,6
Provinsi Q	Literasi	49,7	54,7	56,1	59,6
	Numerasi	50,4	51,5	52,0	53,8
Provinsi R	Literasi	61,3	65,6	66,7	67,1
	Numerasi	53,0	54,8	55,3	56,0
Provinsi S	Literasi	55,1	58,0	61,6	65,7
	Numerasi	51,4	52,4	53,8	54,6
Provinsi T	Literasi	56,4	62,1	62,0	59,8
	Numerasi	52,1	53,6	53,4	52,0
Provinsi U	Literasi	54,4	56,9	61,3	57,9
	Numerasi	51,4	52,4	54,1	53,1
Provinsi V	Literasi	54,3	58,2	61,4	61,3
	Numerasi	51,3	52,7	53,8	53,6
Provinsi W	Literasi	66,0	71,5	74,2	77,3
	Numerasi	55,1	57,2	57,9	60,8
Provinsi X	Literasi	54,4	58,2	61,3	59,3
	Numerasi	51,2	52,4	53,5	52,9
Provinsi Y	Literasi	49,3	53,4	53,9	49,3
	Numerasi	49,8	51,4	51,6	49,5
Provinsi Z	Literasi	51,1	55,9	56,1	62,2
	Numerasi	50,3	52,1	52,3	54,5
Provinsi AA	Literasi	55,5	56,2	55,7	59,1
	Numerasi	51,7	52,0	52,2	53,4
Provinsi AB	Literasi	57,9	62,4	64,8	67,3
	Numerasi	52,7	54,3	55,1	56,2
Provinsi AC	Literasi	57,8	61,7	64,4	55,7
	Numerasi	52,4	53,6	54,6	52,8
Provinsi AD	Literasi	52,4	53,5	57,6	58,5
	Numerasi	51,4	50,9	52,3	53,6
Provinsi AE	Literasi	53,9	57,6	61,0	66,4
	Numerasi	51,3	52,3	53,6	55,1

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Provinsi AF	Literasi	53,0	56,4	57,4	60,5
	Numerasi	51,0	52,3	52,6	54,2
Provinsi AH	Literasi	53,1	54,6	57,8	55,3
	Numerasi	50,8	51,5	52,8	51,9
Provinsi AI	Literasi	53,5	56,4	62,0	57,9
	Numerasi	51,3	52,4	54,2	52,8

Berdasarkan kategori wilayah, satuan pendidikan di daerah nontertinggal memiliki skor AN 2021 lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan di daerah tertinggal pada semua kelompok pengguna kurikulum, dengan selisih yang cukup signifikan, terutama pada literasi. Berdasarkan kategori pengguna kurikulum di kedua wilayah ini, satuan pelaksana Kurikulum Merdeka untuk semua durasi waktu penerapan memiliki skor hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013. Jika pola skor AN 2021 jenjang SMP/ sederajat secara nasional adalah satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama 2 tahun (sejak 2022) memiliki rata-rata capaian paling tinggi, maka jika dilihat berdasarkan kategori wilayah, pola tersebut berlaku bagi skor literasi dan numerasi pada satuan pendidikan yang berada di daerah nontertinggal (literasi 65,8 dan numerasi 55,4). Sedangkan rata-rata capaian skor AN 2021 pada daerah tertinggal (baik literasi maupun numerasi), rata-rata capaian skor tertingginya diperoleh satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021 (literasi 54,5 dan numerasi 51,7) (Gambar 3.8).

Tabel 3.8 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMP/MTs/ Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Jenis Wilayah

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Daerah Tertinggal	Literasi 2021	48,7	51,8	53,0	54,5
	Numerasi 2021	49,8	50,9	51,0	51,7
Daerah Nontertinggal	Literasi 2021	56,3	61,3	65,8	64,9
	Numerasi 2021	52,0	53,8	55,4	55,2

Berdasarkan kelompok sosial ekonomi, hubungan positif antara tingkat sosial ekonomi dengan hasil belajar terkonfirmasi dari gambaran data hasil AN 2021. Satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013

yang berasal dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi memiliki skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan dari kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka juga terlihat memiliki skor yang lebih baik dibandingkan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 pada semua lapisan sosial ekonomi (Gambar 3.9).

Tabel 3.9 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Tingkat Sosial Ekonomi Satuan Pendidikan

Tingkat Sosial Ekonomi	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
20% atas	Literasi 2021	59,1	64,9	68,8	67,6
	Numerasi 2021	52,8	54,9	56,4	56,3
60% tengah	Literasi 2021	56,3	60,6	64,7	64,0
	Numerasi 2021	52,1	53,6	55,0	54,8
20% bawah	Literasi 2021	51,9	54,2	57,2	54,3
	Numerasi 2021	50,8	51,6	52,6	51,8

Analisis juga dilakukan untuk melihat hasil belajar berdasarkan empat kelompok peringkat hasil literasi dan numerasi, dari yang tertinggi hingga terendah. Pada semua kelompok peringkat hasil belajar tersebut, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka memiliki hasil belajar awal yang lebih baik dibandingkan satuan pendidikan yang masih menerapkan Kurikulum 2013. Variasi polanya hanya terdapat pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sendiri, terutama pada satuan pendidikan yang berada dalam kelompok kuartil ketiga dan keempat, baik untuk skor literasi maupun numerasi.

Secara umum, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka selama 3 tahun memiliki hasil belajar awal (literasi maupun numerasi AN 2021) yang lebih tinggi dari pelaksana Kurikulum Merdeka dalam durasi yang lebih pendek maupun pengguna Kurikulum 2013, terutama pada kuartil pertama dan kedua. Sebagai contoh, satuan pendidikan pada kuartil pertama yang menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021 memiliki skor literasi 75,7 dan numerasi 59,3. Skor ini adalah yang paling tinggi dibandingkan pelaksana Kurikulum Merdeka pada 2022, 2023, maupun Kurikulum 2013. Pola yang sama juga terjadi pada hasil belajar awal satuan pendidikan di kuartil kedua. Pada kelompok kuartil ketiga dan keempat, skor awal tertinggi (baik literasi maupun numerasi) justru

terjadi pada satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka pada 2022. Pada kuartil ketiga misalnya, skor literasi tertinggi sebesar 59,0 dan skor numerasi sebesar 53,1, diperoleh satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2022 (Gambar 3.10).

Tabel 3.10 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Kelompok Peringkat Hasil Literasi dan Numerasi

Kelompok Peringkat Hasil belajar	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
		Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Kuartil Literasi SMP/MTs/Sederajat (2021)				
Kuartil Pertama	66,0	70,6	75,6	75,7
Kuartil Kedua	56,4	60,2	65,9	66,1
Kuartil Ketiga	50,8	54,2	59,0	58,0
Kuartil Keempat	43,0	46,4	50,4	49,1
Kuartil Numerasi SMP/MTs/Sederajat (2021)				
Kuartil Pertama	55,6	57,1	59,0	59,3
Kuartil Kedua	52,4	53,5	55,3	55,3
Kuartil Ketiga	50,6	51,7	53,1	53,0
Kuartil Keempat	46,8	48,7	50,1	49,5

3.2.3 Hasil Belajar Awal pada Jenjang SMA/MA/Sederajat

Secara nasional, pengguna Kurikulum Merdeka yang paling lama (sejak 2021) di jenjang SMA/ sederajat memiliki skor AN 2021 yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang belakangan menerapkan Kurikulum Merdeka (sejak 2022 dan 2023) dan pengguna Kurikulum 2013. Skor literasi satuan pendidikan SMA/ sederajat pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2021 sebesar 67,7, sedangkan skor pelaksana Kurikulum Merdeka 2022 sebesar 67,6, pelaksana Kurikulum Merdeka 2023 sebesar 64,0, dan pelaksana Kurikulum 2013 sebesar 59,0. Pola yang sama juga berlaku pada skor numerasi, di mana skor numerasi paling tinggi terdapat pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2021, dibandingkan dengan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2022, pengguna Kurikulum Merdeka 2023, serta satuan pendidikan yang masih menerapkan Kurikulum 2013.

Tabel 3.11 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum

Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
		Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Literasi 2021	59,0	64,0	67,6	67,7
Numerasi 2021	48,8	51,1	53,1	53,1

Secara umum, pola yang sama juga terjadi jika melihat sebaran hasil belajar berdasarkan provinsi, meskipun terdapat sebelas provinsi yang tidak sesuai kecenderungan umum. Pada sebelas provinsi tersebut, skor AN 2021 tertinggi, baik literasi maupun numerasi dicapai oleh satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2022 (Gambar 3.12). Salah satu contoh di provinsi A, di mana skor AN tertinggi ada pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2022 (skor literasi 76,9 dan numerasi 59,6). Selain itu, ditemukan juga provinsi dengan kondisi berbeda antara skor literasi dan numerasi. Salah satunya di provinsi Z, di mana skor literasi tertinggi berada pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2022 (skor literasi 61,1), sedangkan skor numerasi tertingginya ada pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2021 (skor numerasi 50,1).

Tabel 3.12 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Provinsi

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Nasional	Literasi	59,0	64,0	67,6	67,7
	Numerasi	48,8	51,1	53,1	53,1
Provinsi A	Literasi	71,7	73,6	76,9	73,8
	Numerasi	53,7	57,4	59,6	57,3
Provinsi B	Literasi	59,2	63,5	64,0	60,6
	Numerasi	48,5	50,5	50,6	48,4
Provinsi C	Literasi	61,0	66,3	70,0	72,0
	Numerasi	49,8	52,3	54,6	55,5
Provinsi D	Literasi	56,5	60,4	60,8	60,6
	Numerasi	47,5	49,3	49,5	48,6
Provinsi E	Literasi	54,8	58,4	63,6	63,2
	Numerasi	46,5	48,0	50,1	49,7
Provinsi F	Literasi	49,6	59,4	59,4	63,2
	Numerasi	45,2	49,0	49,2	51,9

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Provinsi G	Literasi	57,7	66,2	66,7	70,5
	Numerasi	48,2	51,9	52,5	55,3
Provinsi H	Literasi	60,6	63,4	65,1	62,4
	Numerasi	49,5	50,8	51,3	50,3
Provinsi I	Literasi	57,6	67,1	68,3	68,7
	Numerasi	48,8	52,7	53,1	53,5
Provinsi J	Literasi	58,1	65,0	65,6	67,8
	Numerasi	48,4	51,9	52,4	53,2
Provinsi K	Literasi	61,0	67,8	71,3	71,9
	Numerasi	49,8	53,0	55,2	55,6
Provinsi L	Literasi	59,2	64,7	66,7	67,7
	Numerasi	48,3	51,2	52,2	52,4
Provinsi M	Literasi	56,1	59,4	63,7	64,3
	Numerasi	47,8	48,9	50,9	50,8
Provinsi N	Literasi	53,1	55,1	59,5	67,0
	Numerasi	45,9	47,2	48,8	50,4
Provinsi O	Literasi	59,5	68,0	69,0	71,3
	Numerasi	49,1	53,2	53,5	53,8
Provinsi P	Literasi	66,2	68,1	69,6	70,1
	Numerasi	52,8	53,2	53,6	56,1
Provinsi Q	Literasi	55,5	56,7	59,9	60,0
	Numerasi	47,2	47,8	49,1	49,0
Provinsi R	Literasi	58,5	64,7	67,7	64,4
	Numerasi	48,4	50,9	52,8	49,9
Provinsi S	Literasi	58,2	61,5	64,5	68,9
	Numerasi	48,2	49,8	51,2	54,2
Provinsi T	Literasi	55,2	61,7	65,6	68,1
	Numerasi	47,1	49,7	51,4	50,6
Provinsi U	Literasi	58,9	62,5	63,1	63,9
	Numerasi	49,0	50,4	50,7	51,1
Provinsi V	Literasi	56,1	61,8	65,9	64,4
	Numerasi	47,0	49,9	51,7	51,6
Provinsi W	Literasi	65,6	73,0	72,9	74,1
	Numerasi	51,8	56,8	56,1	58,0
Provinsi X	Literasi	54,3	54,5	63,7	59,6
	Numerasi	45,9	46,5	50,1	48,8
Provinsi Y	Literasi	54,6	60,0	60,8	63,9
	Numerasi	46,2	49,3	49,1	51,4

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Provinsi Z	Literasi	53,7	59,1	61,1	60,6
	Numerasi	46,7	49,1	49,9	50,1
Provinsi AA	Literasi	56,5	59,2	59,5	62,6
	Numerasi	47,5	48,7	49,3	50,3
Provinsi AB	Literasi	60,9	66,1	68,1	70,5
	Numerasi	49,8	52,2	53,3	54,0
Provinsi AC	Literasi	59,8	65,3	67,7	67,6
	Numerasi	48,9	51,4	52,3	52,3
Provinsi AD	Literasi	57,0	60,3	58,3	-
	Numerasi	46,9	48,6	47,1	-
Provinsi AE	Literasi	58,3	62,8	64,8	68,6
	Numerasi	48,6	50,3	51,1	53,7
Provinsi AF	Literasi	56,5	60,8	62,7	62,5
	Numerasi	48,0	49,7	50,6	50,0
Provinsi AH	Literasi	58,5	60,6	61,1	56,8
	Numerasi	48,5	49,5	49,6	48,2
Provinsi AI	Literasi	56,1	59,5	64,4	60,9
	Numerasi	47,4	48,9	51,6	50,6

Sementara berdasarkan kategori wilayah, satuan pendidikan di daerah nontertinggal memiliki skor lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan di daerah tertinggal pada semua kelompok pengguna kurikulum, dengan jarak yang cukup besar, terutama pada literasi. Baik di daerah tertinggal maupun nontertinggal, hasil belajar awal secara konsisten mengikuti pola nasional, di mana satuan pelaksana Kurikulum Merdeka untuk semua durasi penerapan memiliki skor hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013. Pola tersebut berlaku baik pada skor literasi maupun numerasi.

Tabel 3.13 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Jenis Wilayah

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Daerah Tertinggal	Literasi 2021	53,9	56,9	58,1	59,5
	Numerasi 2021	46,3	47,6	48,0	48,4
Daerah Nontertinggal	Literasi 2021	59,3	64,3	67,7	67,9
	Numerasi 2021	49,0	51,3	53,2	53,2

Jika dilihat berdasarkan aspek sosial ekonomi satuan pendidikan, tingkat sosial ekonomi yang tinggi berkorelasi dengan hasil belajar yang tinggi pula. Data menunjukkan bahwa satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 yang berasal dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi, memiliki skor literasi dan numerasi pada AN 2021 yang juga lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan dari kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka juga terlihat memiliki skor yang lebih baik dibandingkan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 pada semua tingkat sosial ekonomi.

Tabel 3.14 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Tingkat Sosial Ekonomi Satuan Pendidikan

Tingkat Sosial Ekonomi	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
20% atas	Literasi 2021	61,6	66,7	70,2	69,1
	Numerasi 2021	50,1	52,5	54,6	54,1
60% tengah	Literasi 2021	59,6	63,9	67,2	67,6
	Numerasi 2021	49,0	51,1	52,8	53,0
20% bawah	Literasi 2021	56,3	58,9	62,0	60,4
	Numerasi 2021	47,6	48,7	50,0	48,9

Sementara itu, berdasarkan kelompok peringkat hasil belajar, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka pada semua kelompok peringkat hasil literasi dan numerasi juga memiliki hasil belajar awal yang lebih baik dibandingkan dengan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013. Pola ini seragam terjadi baik pada hasil skor literasi maupun numerasi. Pola pada keempat kelompok tersebut juga selaras dengan pola yang terjadi di tingkat nasional, di mana satuan pendidikan yang lebih awal menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki skor literasi maupun numerasi yang lebih tinggi dibandingkan pelaksana Kurikulum Merdeka yang lebih belakangan dan pengguna Kurikulum 2013.

Tabel 3.15 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Kelompok Peringkat Hasil Literasi dan Numerasi

Kelompok Peringkat Hasil belajar	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
		Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Kuartil Literasi SMA/MA/Sederajat (2021)				
Kuartil Pertama	67,2	71,1	74,8	75,2
Kuartil Kedua	59,2	63,2	67,8	69,2
Kuartil Ketiga	54,7	58,6	62,3	64,4
Kuartil Keempat	48,7	52,7	55,7	57,7
Kuartil Numerasi SMA/MA/Sederajat (2021)				
Kuartil Pertama	53,0	54,9	57,3	57,9
Kuartil Kedua	49,1	50,6	52,8	53,5
Kuartil Ketiga	47,2	48,6	50,1	50,8
Kuartil Keempat	43,4	45,8	47,3	48,0

3.2.4 Hasil Belajar Awal pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat

Secara nasional, pengguna Kurikulum Merdeka yang paling awal di jenjang SMK/ sederajat memiliki skor AN 2021 yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang lebih belakangan menerapkan Kurikulum Merdeka dan juga pengguna Kurikulum 2013. Rata-rata capaian skor literasi satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021 adalah sebesar 64,4, pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2022 sebesar 63,8, pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2023 sebesar 60,5, dan pelaksana Kurikulum 2013 sebesar 58,2. Pola yang sama juga berlaku pada skor numerasi, di mana skor numerasi paling tinggi dimiliki oleh satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021, diikuti skor satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2022 dan 2023, serta satuan pendidikan yang masih menerapkan Kurikulum 2013.

Tabel 3.16 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum

Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
		Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Literasi	58,2	60,5	63,8	64,4
Numerasi	48,6	49,7	51,1	51,6

Jika dilihat berdasarkan sebaran wilayahnya, hampir di seluruh provinsi, satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki skor awal literasi maupun numerasi lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013 (Tabel 3.17). Keadaan berbeda terjadi pada empat provinsi, yaitu provinsi I, AE, Q, dan AD di mana satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 memiliki skor numerasi paling tinggi dibandingkan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dari seluruh kelompok durasi waktu penerapan. Di provinsi AE misalnya, skor numerasi satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 adalah sebesar 50,7, sedangkan skor numerasi pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2023 adalah sebesar 48,7, pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2022 sebesar 49,9, sedangkan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021 adalah sebesar 50,0.

Pada jenjang pendidikan lainnya, jangka waktu pelaksanaan Kurikulum Merdeka biasanya menggambarkan perbedaan skor awal literasi dan numerasi. Namun, pola yang terjadi pada jenjang SMK lebih beragam. Pada provinsi E dan G misalnya, skor awal literasi dan numerasi tertinggi terdapat pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka selama 3 tahun (sejak 2021). Tetapi, pada provinsi S dan AH serta beberapa provinsi lainnya, skor awal literasi dan numerasi tertinggi diperoleh satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka selama 2 tahun (sejak 2022). Sementara pada Provinsi I, skor awal literasi tertinggi dimiliki satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka selama 1 tahun.

Tabel 3.17 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Provinsi

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Nasional	Literasi	58,2	60,5	63,8	64,4
	Numerasi	48,6	49,7	51,1	51,6
Provinsi A	Literasi	63,3	66,8	70,7	68,2
	Numerasi	51,2	52,2	55,0	54,0
Provinsi B	Literasi	57,0	59,9	57,9	59,7
	Numerasi	48,0	49,0	48,6	49,2
Provinsi C	Literasi	58,5	61,9	64,6	65,6
	Numerasi	49,0	50,4	51,6	52,2
Provinsi D	Literasi	57,0	57,1	61,0	60,6
	Numerasi	50,6	50,7	50,1	49,6

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Provinsi E	Literasi	55,8	56,4	57,2	57,9
	Numerasi	47,7	46,9	47,1	50,2
Provinsi F	Literasi	52,8	54,9	58,0	56,8
	Numerasi	46,3	47,5	47,7	49,5
Provinsi G	Literasi	57,2	59,1	63,3	64,1
	Numerasi	47,6	49,5	50,5	50,9
Provinsi H	Literasi	58,2	59,4	62,4	65,5
	Numerasi	48,2	48,9	50,5	51,5
Provinsi I	Literasi	60,5	65,6	64,6	63,5
	Numerasi	51,8	51,8	51,0	50,9
Provinsi J	Literasi	57,4	60,8	62,3	63,7
	Numerasi	48,3	49,8	50,3	50,6
Provinsi K	Literasi	60,8	62,4	65,3	67,8
	Numerasi	49,9	50,7	51,9	53,5
Provinsi L	Literasi	63,6	63,4	64,9	66,2
	Numerasi	50,8	50,6	51,0	52,3
Provinsi M	Literasi	52,4	56,4	55,1	56,6
	Numerasi	46,2	48,9	47,4	49,8
Provinsi N	Literasi	51,5	53,7	57,6	58,8
	Numerasi	45,5	46,1	44,9	48,2
Provinsi O	Literasi	59,3	61,3	64,2	66,9
	Numerasi	47,3	49,3	51,1	53,4
Provinsi P	Literasi	67,1	66,9	67,8	63,7
	Numerasi	51,9	52,1	52,6	51,9
Provinsi Q	Literasi	54,0	53,8	58,2	54,9
	Numerasi	49,7	45,6	47,8	46,3
Provinsi R	Literasi	62,5	63,4	64,8	67,7
	Numerasi	50,1	50,7	51,1	52,7
Provinsi S	Literasi	57,9	60,5	62,7	60,6
	Numerasi	48,0	49,0	50,3	49,9
Provinsi T	Literasi	58,7	61,3	60,6	64,5
	Numerasi	46,6	50,0	49,6	50,8
Provinsi U	Literasi	56,4	57,3	59,4	60,3
	Numerasi	47,6	48,3	49,3	49,5
Provinsi V	Literasi	58,3	59,1	60,9	61,6
	Numerasi	48,8	48,7	49,4	49,7
Provinsi W	Literasi	64,1	65,8	68,2	69,4
	Numerasi	51,5	52,0	52,9	53,5

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Provinsi X	Literasi	56,4	58,4	59,9	54,8
	Numerasi	46,3	47,5	48,5	46,4
Provinsi Y	Literasi	54,4	57,0	56,6	57,6
	Numerasi	46,4	47,7	46,7	47,6
Provinsi Z	Literasi	54,3	57,4	56,7	58,4
	Numerasi	47,3	47,9	48,5	49,1
Provinsi AA	Literasi	54,9	56,3	58,2	58,9
	Numerasi	46,8	48,5	48,2	48,3
Provinsi AB	Literasi	59,6	61,2	63,6	63,9
	Numerasi	49,1	50,0	50,9	51,4
Provinsi AC	Literasi	62,8	61,4	64,6	58,4
	Numerasi	50,2	49,5	51,0	52,3
Provinsi AD	Literasi	52,8	55,0	55,7	52,3
	Numerasi	45,9	45,0	45,5	44,2
Provinsi AE	Literasi	62,1	58,9	61,9	63,1
	Numerasi	50,7	48,7	49,9	50,0
Provinsi AF	Literasi	54,5	56,6	58,7	57,9
	Numerasi	47,3	48,1	49,1	50,2
Provinsi AH	Literasi	56,4	55,8	59,2	54,1
	Numerasi	47,6	48,5	48,6	47,4
Provinsi AI	Literasi	57,7	58,8	60,3	60,8
	Numerasi	48,6	48,9	49,4	49,6

Sementara itu, berdasarkan kategori wilayah, satuan pendidikan di daerah nontertinggal memiliki skor lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan di daerah tertinggal pada semua kelompok pengguna kurikulum, meski dengan jarak yang tidak sebesar pada jenjang lainnya. Akan tetapi, berdasarkan kategori pengguna kurikulum, terdapat sedikit perbedaan pola antara skor AN di satuan pendidikan pada daerah tertinggal dan daerah nontertinggal. Di daerah tertinggal, skor awal literasi tertinggi diperoleh satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka selama 2 tahun atau sejak 2022. Skor ini adalah skor tertinggi dibandingkan dengan skor pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021 dan 2023, serta pelaksana Kurikulum 2013 meskipun margin skornya cukup tipis. Hal yang berbeda tergambar pada daerah nontertinggal. Pengguna Kurikulum Merdeka yang lebih awal memiliki modal hasil belajar yang lebih baik pada literasi dan numerasi.

Tabel 3.18 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Jenis Wilayah

Wilayah	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Daerah Tertinggal	Literasi 2021	52,6	54,3	55,7	55,2
	Numerasi 2021	46,3	47,6	48,0	48,4
Daerah Nontertinggal	Literasi 2021	58,5	60,8	63,8	64,4
	Numerasi 2021	49,0	51,3	53,2	53,2

Jika dilihat berdasarkan aspek sosial ekonomi satuan pendidikan, tingkat sosial ekonomi yang tinggi berkorelasi dengan hasil belajar awal yang tinggi pula, demikian pula sebaliknya. Data menunjukkan bahwa satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 yang berasal dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi, memiliki skor awal literasi dan numerasi yang juga lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan dari kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka juga terlihat memiliki modal skor yang lebih baik dibandingkan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 pada semua strata sosial ekonomi.

Tabel 3.19 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Tingkat Sosial Ekonomi Satuan Pendidikan

Tingkat Sosial Ekonomi	Indikator	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
			Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
20% atas	Literasi 2021	59,5	61,5	65,2	65,0
	Numerasi 2021	49,5	49,9	51,7	51,9
60% tengah	Literasi 2021	58,7	60,8	63,5	64,3
	Numerasi 2021	48,8	49,8	51,0	51,5
20% bawah	Literasi 2021	55,6	58,0	60,8	61,8
	Numerasi 2021	47,3	48,7	49,8	50,8

Adapun berdasarkan kelompok performa hasil belajar, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka pada empat kelompok peringkat hasil literasi dan numerasi juga memiliki hasil belajar awal yang lebih baik dibandingkan dengan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013. Pola ini seragam terjadi, baik pada hasil skor literasi maupun numerasi. Selain itu, di seluruh empat kelompok tersebut, satuan pendidikan yang paling lama menerapkan Kurikulum Merdeka, memiliki skor literasi maupun numerasi yang paling tinggi dibandingkan pelaksana Kurikulum Merdeka yang lebih belakangan maupun pengguna Kurikulum 2013.

Tabel 3.20 Rata-rata Skor Literasi-Numerasi AN 2021 pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat Berdasarkan Penerapan Kurikulum dan Kelompok Peringkat Hasil Literasi dan Numerasi

Kelompok Peringkat Hasil belajar	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka		
		Sejak 2023	Sejak 2022	Sejak 2021
Kuartil Literasi SMK (2021)				
Kuartil Pertama	64,4	66,8	69,6	70,8
Kuartil Kedua	58,8	60,9	64,0	65,1
Kuartil Ketiga	54,8	57,0	60,2	61,5
Kuartil Keempat	49,7	52,1	55,3	55,8
Kuartil Numerasi SMK (2021)				
Kuartil Pertama	51,8	52,7	53,8	55,0
Kuartil Kedua	49,0	49,8	51,0	51,8
Kuartil Ketiga	47,4	48,2	49,5	50,0
Kuartil Keempat	44,3	45,8	47,1	47,5

3.3 Perubahan Kualitas Hasil Belajar Setelah Penerapan Kurikulum Merdeka

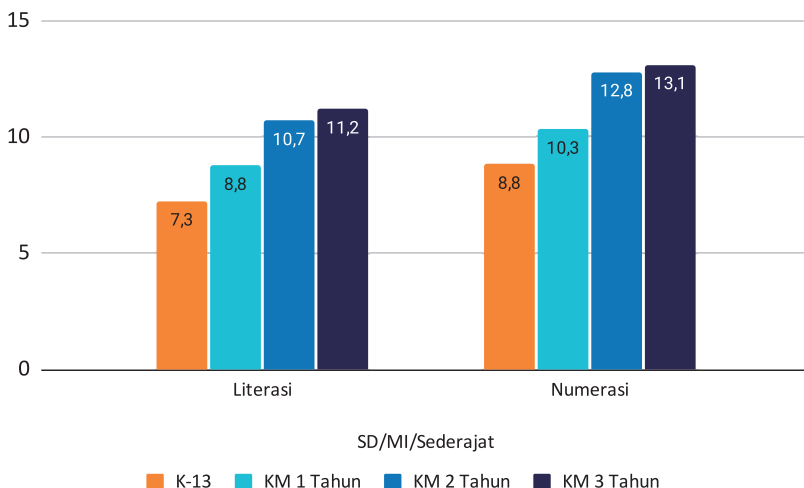
Penerapan Kurikulum Merdeka dapat membantu satuan pendidikan untuk lebih berfokus pada materi yang esensial dan mengakomodasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan hasil asesmen diagnostiknya. Hal itu diharapkan dapat membantu peserta didik agar dapat belajar lebih optimal. Pada bagian ini kita akan melihat apakah penerapan Kurikulum Merdeka oleh satuan pendidikan membuat proses pembelajaran berlangsung lebih baik, sehingga hasil belajar peserta didik juga dapat meningkat secara lebih baik. Kemajuan hasil belajar peserta didik tersebut dapat dilihat melalui selisih hasil AKM literasi dan numerasi pada periode setelah penerapan Kurikulum Merdeka (tahun 2023) dengan hasil AKM literasi dan numerasi pada periode sebelum Kurikulum Merdeka diterapkan (tahun 2021).

Dari hasil AN 2021 dan 2023, terlihat bahwa satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka mengalami peningkatan skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibanding satuan pendidikan yang masih menerapkan Kurikulum 2013. Pola ini terlihat secara konsisten di daerah tertinggal maupun nontertinggal; di satuan pendidikan yang melayani peserta didik dari kelompok sosial-ekonomi bawah, menengah, maupun tinggi; serta di satuan pendidikan yang memiliki kualitas hasil belajar rendah, sedang, maupun tinggi sebelum penerapan Kurikulum Merdeka. Pola ini juga secara konsisten terlihat di semua daerah kecuali di provinsi AH, di mana

perubahan skor literasi dan numerasi tampaknya tidak dipengaruhi secara signifikan oleh jenis kurikulum yang digunakan.

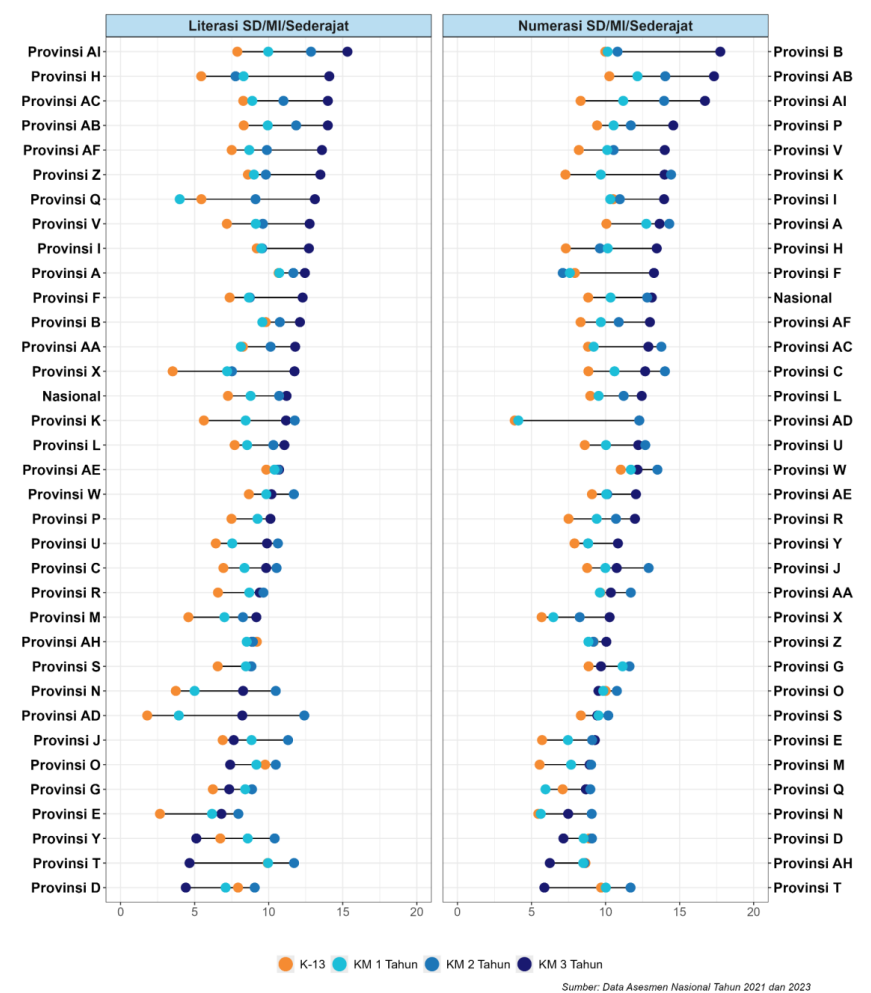
3.3.1 Perubahan Kualitas Hasil Belajar pada Jenjang SD/MI/Sederajat

Secara umum, data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan skor literasi dan numerasi dari tahun 2021 ke 2023 pada semua satuan pendidikan yang mengikuti AN. Akan tetapi, jika melihat kategori penerapan kurikulum, peningkatan skor literasi dan numerasi pada SD/ sederajat yang menerapkan Kurikulum Merdeka lebih tinggi dibandingkan dengan satuan pendidikan yang belum menerapkannya. Satuan pendidikan yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka selama 3 tahun menunjukkan peningkatan skor literasi yang paling tinggi, yaitu sebesar 11,2 poin dibandingkan satuan pendidikan yang baru menerapkan Kurikulum Merdeka selama dua dan satu tahun. Sedangkan satuan pendidikan yang masih menerapkan Kurikulum 2013, meskipun sama-sama mengalami peningkatan, tetapi peningkatan yang terjadi lebih rendah, yaitu 7,3 poin (Gambar 3.5). Perbedaan peningkatan capaian literasi antara satuan pendidikan yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka dan yang belum berkisar antara 1,5 sampai dengan 4 poin. Terlihat bahwa satuan pendidikan yang lebih lama menerapkan Kurikulum Merdeka menunjukkan peningkatan skor yang lebih tinggi.



Gambar 3.5 Perubahan Rata-rata Skor Literasi-Numerasi Jenjang SD/MI/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum.

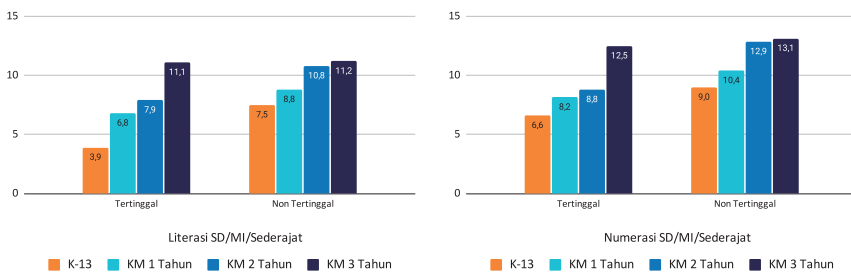
Hal serupa juga terlihat pada perubahan hasil capaian numerasi dari AN tahun 2021 ke tahun 2023. Peningkatan skor numerasi ini juga lebih tinggi dibandingkan skor literasi. Satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki skor numerasi lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang belum menerapkannya. Makin lama Kurikulum Merdeka diterapkan, maka peningkatan skor numerasi juga terlihat kian baik. Selisih peningkatan skor antara satuan pendidikan pengguna Kurikulum Merdeka selama tiga tahun dan Kurikulum 2013 mencapai 4,3 poin (Gambar 3.5).



Gambar 3.6 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SD/MI/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Provinsi.

Apabila dilihat lebih lanjut di level provinsi, maka pola serupa juga terjadi. Pada sebagian besar provinsi di Indonesia, satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka menunjukkan peningkatan skor literasi yang lebih baik dibandingkan dengan satuan pendidikan yang masih menggunakan Kurikulum 2013. Makin lama durasi penggunaan Kurikulum Merdeka, kian memperlihatkan peningkatan skor literasi yang besar. Bahkan di beberapa provinsi, terdapat perbedaan peningkatan skor literasi yang signifikan antara SD/ sederajat yang menerapkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, di mana selisihnya mencapai 7–10 poin seperti pada provinsi AI, H, X, N, dan AD (Gambar 3.6).

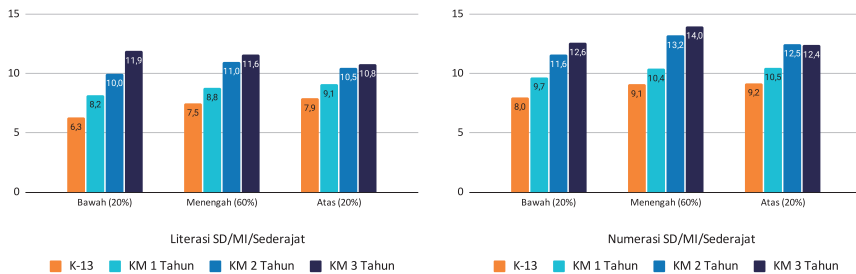
Peningkatan skor numerasi sedikit lebih tinggi dibandingkan skor literasi, namun tetap memiliki pola serupa, yakni satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki peningkatan skor lebih tinggi dibandingkan yang menerapkan Kurikulum 2013. Terdapat satu provinsi yang cukup berbeda, yaitu provinsi AH dengan skor satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pelaksana Kurikulum Merdeka (Gambar 3.6).



Gambar 3.7 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SD/MI/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Jenis Wilayah.

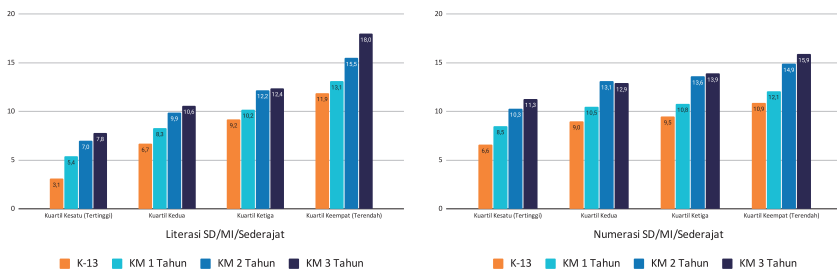
Berdasarkan kategori wilayah, kemajuan hasil belajar pengguna Kurikulum Merdeka juga terlihat baik di daerah nontertinggal maupun daerah tertinggal dengan pola yang mirip. Lebih lama Kurikulum Merdeka diterapkan, maka makin besar kemajuan hasil belajarnya. Akan tetapi, perbandingan kemajuan skor hasil belajar terlihat lebih nyata di daerah tertinggal. Selisih kemajuan hasil belajar antara pengguna Kurikulum Merdeka selama 3 tahun dibandingkan pengguna Kurikulum 2013 mencapai 7 poin untuk literasi dan 6 poin untuk numerasi (Gambar 3.7). Hal ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka bukan hanya dapat diterapkan untuk konteks yang beragam, namun bahkan

memberikan manfaat lebih besar bagi satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal.



Gambar 3.8 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SD/MI/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi Satuan Pendidikan.

Sementara itu, berdasarkan kategori sosial ekonomi, hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan skor literasi dan numerasi pada satuan pendidikan dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih besar dibandingkan satuan pendidikan yang berasal dari kategori status sosial ekonomi lebih rendah. Meskipun demikian, kesenjangan kemajuan belajar antarkelompok pengguna kurikulum lebih terlihat pada kelompok menengah ke bawah dibandingkan lapisan sosial ekonomi atas. Margin kemajuan belajar antara pengguna Kurikulum Merdeka selama tiga tahun dengan pengguna Kurikulum 2013 untuk literasi, misalnya, mencapai 5,7 poin pada kelompok bawah, berbanding 2,9 poin pada kelompok atas. Sedangkan untuk numerasi, jaraknya sebesar 4,6 poin pada kelompok bawah, berbanding 3,1 poin pada kelompok atas (Gambar 3.8).



Gambar 3.9 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SD/MI/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Kelompok Peringkat Hasil Belajar Literasi dan Numerasi pada AN 2021.

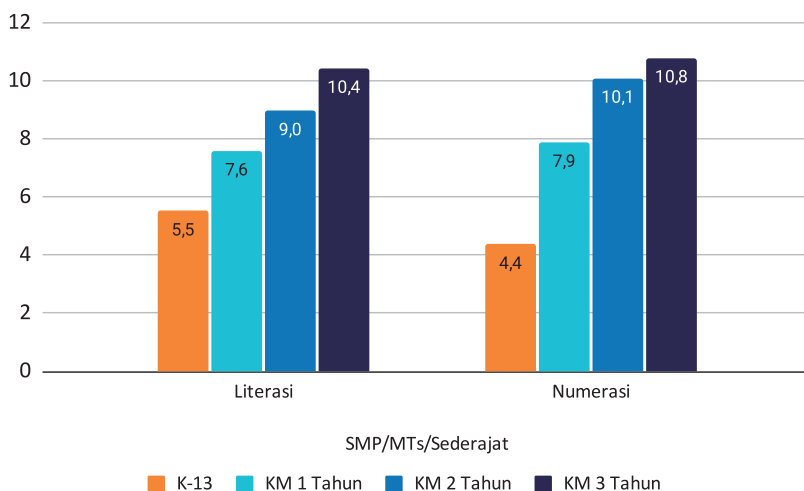
Analisis lebih lanjut dilakukan untuk melihat perubahan skor terhadap satuan pendidikan berdasarkan kelompok peringkat hasil belajar. Satuan

pendidikan yang telah menggunakan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun memiliki skor tertinggi di semua kuartil, diikuti pelaksana Kurikulum Merdeka selama dua tahun dan satu tahun, serta pelaksana Kurikulum 2013. Hal yang berbeda terjadi pada kemajuan skor numerasi, di mana satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka selama dua tahun pada semua kuartil memiliki peningkatan skor numerasi tertinggi, diikuti pelaksana Kurikulum Merdeka lainnya dan pelaksana Kurikulum 2013 (Gambar 3.9).

Selain itu, hal menarik terlihat dari perbedaan peningkatan skor dari kuartil pertama hingga keempat. Pada skor awal literasi dan numerasi (hasil AN 2021) yang telah dibahas di bagian sebelumnya (Tabel 3.5), tampak bahwa capaian skor awal literasi dan numerasi untuk SD/ sederajat pada kuartil pertama, kedua, ketiga, dan keempat tampak berurutan, di mana kuartil pertama memiliki skor awal paling tinggi diikuti kuartil berikutnya. Namun, hasil analisis terhadap peningkatan skor literasi dan numerasi justru menunjukkan hasil sebaliknya, di mana peningkatan skor tertinggi terjadi pada kuartil terbawah, diikuti kuartil ketiga, kedua, dan pertama (Gambar 3.9). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan skor terbesar terjadi pada satuan pendidikan pada kelompok yang awalnya memiliki kinerja paling rendah dibandingkan kelompok yang sebelumnya memiliki kinerja lebih tinggi. Indikasi ini dalam jangka panjang dapat mempersempit kesenjangan capaian hasil belajar peserta didik antara satuan pendidikan pada kuartil teratas dan terbawah dikarenakan skor terbawah bergerak mendekati rata-rata.

3.3.2 Perubahan Kualitas Hasil Belajar pada Jenjang SMP/MTs/ Sederajat

Perubahan capaian literasi dan numerasi pada jenjang SMP/ sederajat berdasarkan perbandingan hasil AN 2021 dan 2023 memiliki kesamaan pola, di mana satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka lebih lama menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan yang masih menerapkan Kurikulum 2013. Apabila dibandingkan dengan jenjang SD/ sederajat, peningkatan skor pada jenjang SMP/ sederajat sedikit lebih rendah. Satuan pendidikan SMP yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun sejak 2021 memiliki peningkatan skor literasi tertinggi, yaitu sebesar 10,4 poin dibandingkan satuan pendidikan lainnya. Sementara satuan pendidikan SMP/ sederajat yang masih menerapkan Kurikulum 2013 memiliki peningkatan skor literasi sebesar 5,5 poin. Selisih peningkatan skor literasi antara satuan pendidikan SMP/ sederajat pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 berkisar antara 2–5 poin (Gambar 3.10).

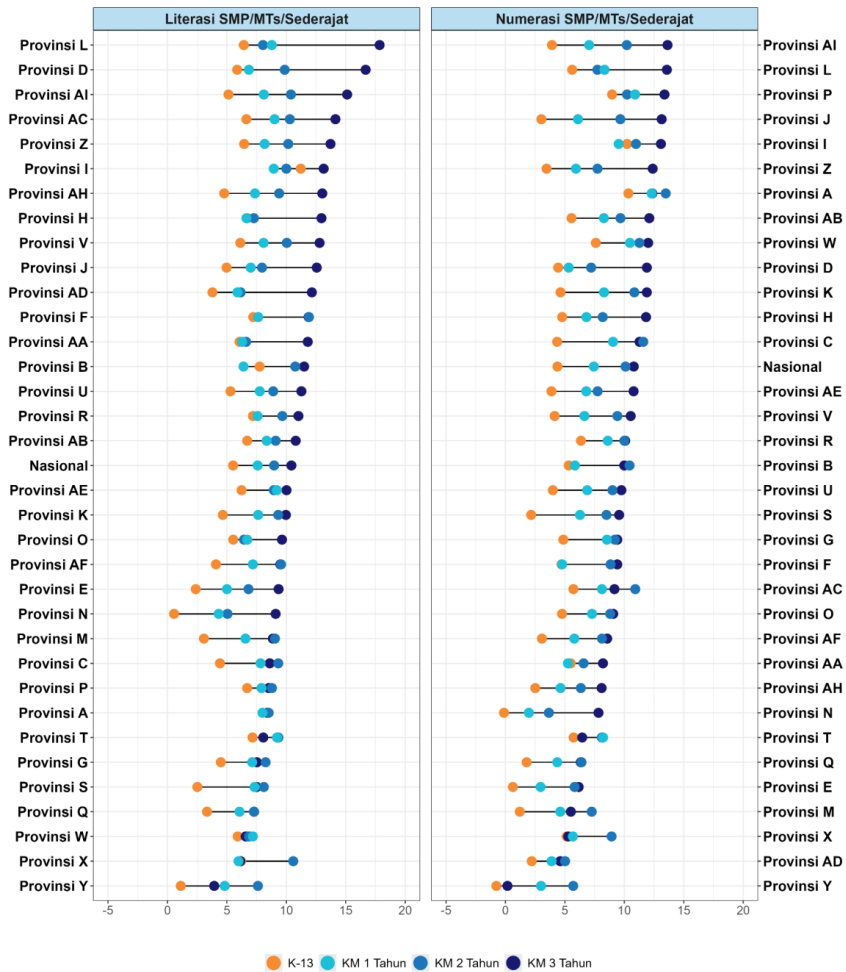


Gambar 3.10 Perubahan Rata-rata Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMP/MTs/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum.

Untuk skor numerasi, peningkatan pada satuan pendidikan SMP/ sederajat yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka sedikit lebih tinggi dibandingkan peningkatan skor literasi, yakni sebesar 10,8 poin. Sedangkan pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 peningkatan skor numerasinya hanya sebesar 4,4 poin, lebih rendah dibandingkan peningkatan skor literasi. Pola umum juga terjadi, di mana satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka lebih lama cenderung memiliki peningkatan skor yang lebih tinggi. Perbedaan peningkatan skor numerasi antara satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 berkisar antara 3–6 poin (Gambar 3.10).

Perubahan skor literasi jenjang SMP/ sederajat di tingkat daerah juga memiliki pola serupa, yakni makin lama menerapkan Kurikulum Merdeka, maka peningkatan skor literasi makin besar. Pada sebagian besar provinsi, satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun memiliki peningkatan yang lebih besar. Perkecualian terjadi pada beberapa provinsi seperti provinsi C, P, G, S, Q, W, X, dan Y, di mana pengguna Kurikulum Merdeka selama dua tahun justru paling tinggi peningkatannya. Meskipun demikian, secara umum satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka tetap memiliki peningkatan skor literasi yang lebih tinggi dibandingkan Kurikulum 2013. Bahkan, pada beberapa daerah terdapat

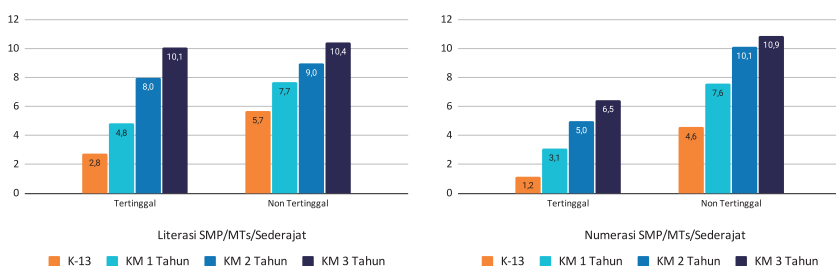
perbedaan yang cukup tajam antara satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan selisih maksimal mencapai 11 poin, seperti pada provinsi L, D, AI, dan N (Gambar 3.11).



Gambar 3.11 Rata-rata Perubahan Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMP/MTs/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Provinsi.

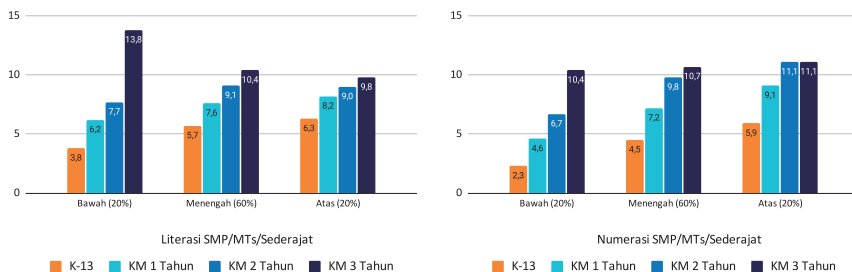
Pola yang mirip juga terjadi untuk peningkatan skor numerasi berdasarkan provinsi. Pada sebagian besar provinsi, satuan pendidikan SMP/ sederajat yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun memiliki kenaikan skor yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan lainnya. Akan tetapi, terdapat 9 provinsi lain di mana peningkatan skor tertinggi dialami oleh satuan

pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama dua tahun, dan satu provinsi di mana kenaikan skor tertinggi diperoleh satuan pendidikan yang baru menerapkan Kurikulum Merdeka selama satu tahun. Meskipun demikian, secara umum pelaksana Kurikulum Merdeka memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan pelaksana Kurikulum 2013. Bahkan pada provinsi N dan Y, pelaksana Kurikulum 2013 mengalami penurunan skor numerasi dari AN tahun 2021 ke tahun 2023. Selisih peningkatan skor terbesar terjadi pada Provinsi J, Z, dan AI yang mencapai hingga 10 poin (Gambar 3.11).



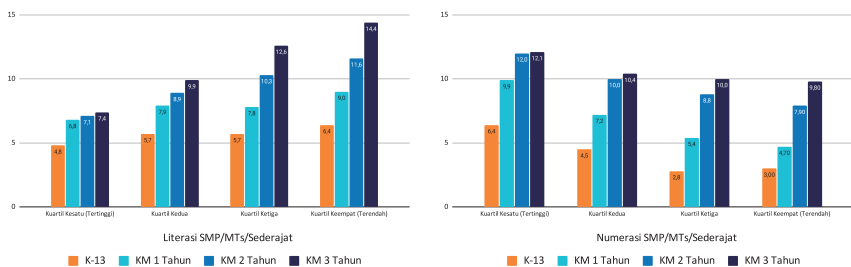
Gambar 3.12 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMP/MTs/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Jenis Wilayah.

Berdasarkan kategori wilayah tertinggal dan nontertinggal, pola peningkatan hasil belajar literasi dan numerasi juga tidak jauh berbeda. Satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada kedua kategori wilayah tersebut cenderung memiliki peningkatan skor literasi dan numerasi yang lebih baik dibandingkan satuan pendidikan yang masih menerapkan Kurikulum 2013. Peningkatan skor literasi dan numerasi pada satuan pendidikan SMP/ sederajat di daerah nontertinggal cenderung lebih besar dibandingkan daerah tertinggal. Bahkan peningkatan skor numerasi di daerah nontertinggal dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan daerah tertinggal.



Gambar 3.13 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMP/MTs/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi Satuan Pendidikan.

Perubahan skor literasi dan numerasi dari tahun 2021 ke 2023 berdasarkan status sosial ekonomi juga mengikuti pola yang sama. Satuan pendidikan SMP/ sederajat yang telah melaksanakan Kurikulum Merdeka lebih lama memiliki peningkatan skor lebih tinggi. Namun yang menarik, untuk peningkatan skor literasi tertinggi justru terjadi pada kelompok sosial ekonomi bawah terutama pada satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun, baru diikuti kelompok sosial ekonomi menengah, kemudian kelompok sosial ekonomi atas. Sementara untuk skor numerasi, kelompok sosial ekonomi menengah memiliki peningkatan lebih tinggi, khususnya pada satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun, kemudian diikuti dua kelompok sosial ekonomi lainnya (Gambar 3.13).



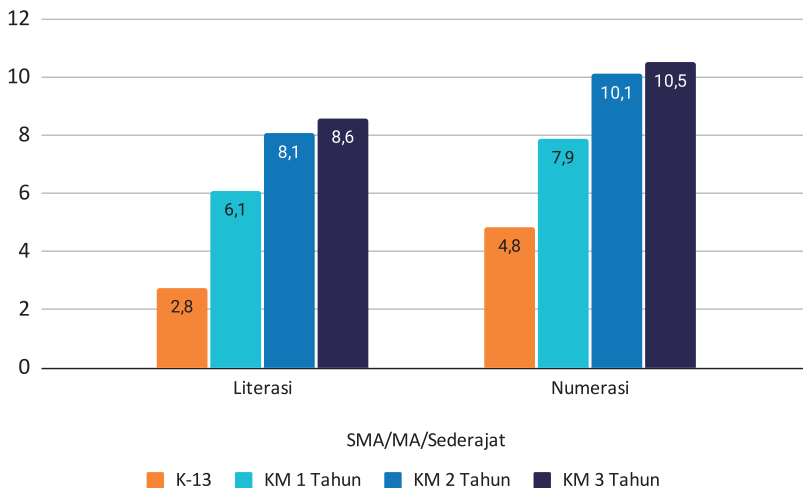
Gambar 3.14 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMP/MTs/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Kelompok Peringkat Hasil Belajar Literasi dan Numerasi pada AN 2021.

Peningkatan skor literasi dan numerasi dilihat berdasarkan kelompok peringkat hasil belajar satuan pendidikan menunjukkan kecenderungan yang sama. Satuan pendidikan SMP/ sederajat yang selama tiga tahun mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di semua kuartil memiliki peningkatan skor literasi dan numerasi lebih besar, diikuti pelaksana Kurikulum Merdeka selama dua tahun, satu tahun, dan pelaksana Kurikulum 2013. Akan tetapi, jika dibandingkan per kuartil, untuk peningkatan skor literasi terlihat bahwa kuartil terbawah memiliki peningkatan skor tertinggi dari skor awal, diikuti kelompok kuartil berikutnya (Gambar 3.14). Ini berarti satuan pendidikan dengan kinerja paling rendah memiliki peluang bangkit lebih besar jika menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal itu memberikan harapan bahwa kecenderungan tersebut dapat mempersempit kesenjangan capaian hasil belajar literasi antara satuan pendidikan SMP/ sederajat dari kuartil terbawah dan kuartil teratas. Meskipun demikian, hal berbeda terjadi pada peningkatan skor numerasi, di mana kuartil teratas justru memiliki

peningkatan terbesar dibandingkan kuartil-kuartil di bawahnya. Dengan demikian, peluang bertahannya kesenjangan lebih besar terjadi pada numerasi daripada literasi.

3.3.3 Perubahan Kualitas Hasil Belajar pada Jenjang SMA/MA/Sederajat

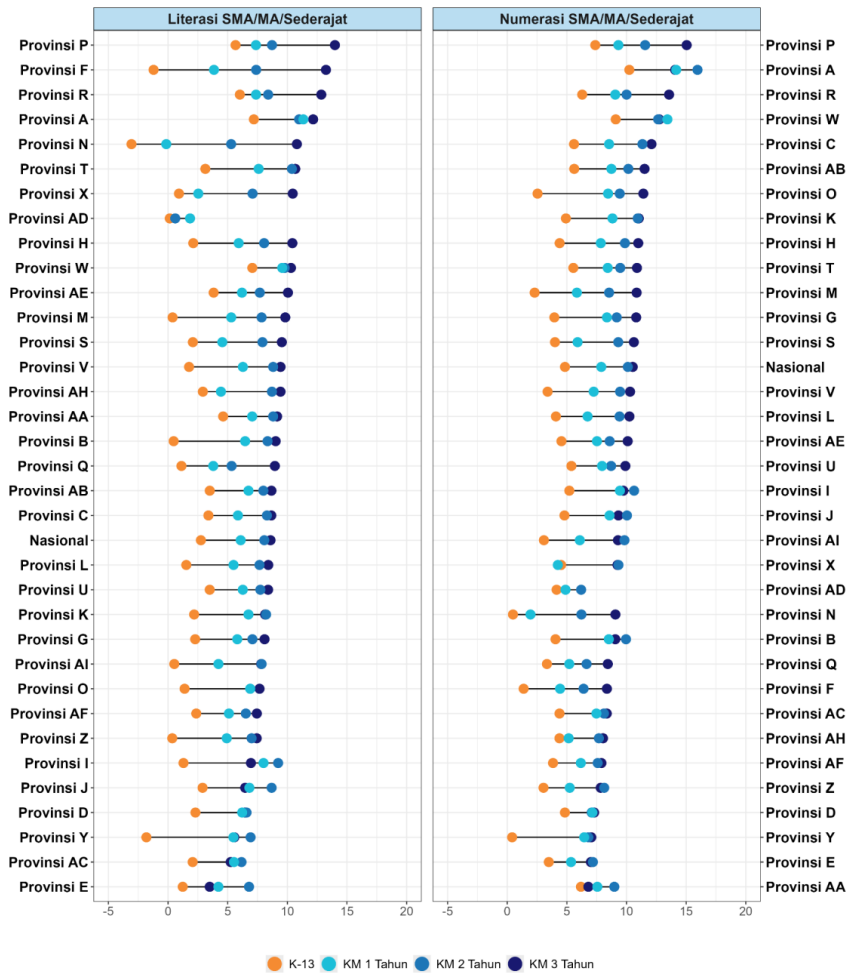
Perubahan hasil AN tahun 2021 ke tahun 2023 pada jenjang SMA/ sederajat secara umum memiliki pola serupa dengan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, di mana satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka lebih lama memiliki peningkatan skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi. Namun, peningkatan di jenjang SMA/ sederajat lebih kecil dibandingkan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Untuk skor literasi, satuan pendidikan SMA/MA/ sederajat yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun memiliki peningkatan skor 8,6 poin, lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama dua tahun dan satu tahun. Sementara satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013 memiliki peningkatan skor literasi terendah, yakni sebesar 2,8 poin. Selisih peningkatan skor literasi antara satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 mencapai 3–6 poin (Gambar 3.15).



Gambar 3.15 Perubahan Rata-rata Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMA/MA/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum.

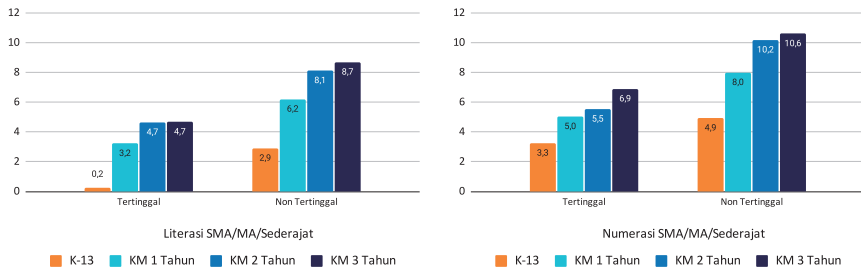
Skor numerasi mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan skor literasi. Satuan pendidikan SMA/ sederajat yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun memiliki peningkatan skor sebesar 10,5 poin, diikuti pelaksana Kurikulum Merdeka selama dua tahun dan satu tahun. Sementara pada pelaksana Kurikulum 2013, peningkatan skor numerasinya hanya sebesar 4,8 poin. Perbedaan peningkatan skor numerasi pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 antara 3–6 poin (Gambar 3.15).

Peningkatan hasil belajar literasi di tingkat daerah juga mengikuti pola secara nasional, bahwa satuan pendidikan SMA/ sederajat yang menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki peningkatan lebih tinggi dibandingkan pelaksana Kurikulum 2013. Peningkatan skor literasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan skor numerasi. Pada sebagian besar provinsi, satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun umumnya memiliki skor paling tinggi, kecuali pada provinsi E, I, J, AC, dan Y di mana satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama dua tahun memiliki peningkatan skor literasi lebih tinggi. Selain itu, terdapat satu provinsi yang satuan pendidikan SMA-nya baru menerapkan Kurikulum Merdeka selama dua tahun, yaitu pada provinsi AD. Secara umum, pelaksana Kurikulum Merdeka pada semua periode memiliki peningkatan skor lebih tinggi dibandingkan pelaksana Kurikulum 2013. Pada beberapa provinsi, seperti provinsi F, N, dan Y kesenjangan peningkatan skor literasi pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 dibandingkan Kurikulum Merdeka mencapai 2–14 poin. Pada ketiga provinsi tersebut, satuan pendidikan SMA/ sederajat pelaksana Kurikulum 2013 juga tercatat mengalami penurunan skor literasi dari hasil AN tahun 2021 ke tahun 2023 (Gambar 3.16).



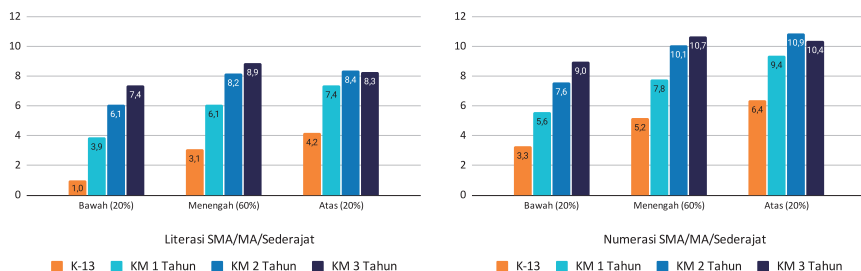
Gambar 3.16 Rata-rata Perubahan Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMA/MA/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Provinsi.

Peningkatan skor numerasi juga memiliki pola yang sama dengan literasi, di mana satuan pendidikan yang lebih lama menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki peningkatan skor lebih tinggi, kecuali pada provinsi A, I, J, AI, B, Z, dan AA, di mana peningkatan skor numerasi tertinggi terjadi pada pelaksana Kurikulum Merdeka selama dua tahun. Pada beberapa provinsi seperti provinsi M, N, O, dan P, selisih peningkatan skor numerasi antara satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dengan pelaksana Kurikulum 2013 mencapai 2-9 poin (Gambar 3.16).



Gambar 3.17 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMA/MA/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Jenis Wilayah.

Apabila dilihat berdasarkan karakteristik daerah tertinggal dan nontertinggal, peningkatan skor literasi dan numerasi juga masih mengikuti kecenderungan yang sama, yakni satuan pendidikan SMA/ sederajat yang menggunakan Kurikulum Merdeka pada dua karakteristik daerah tersebut cenderung memiliki peningkatan skor lebih besar dibandingkan satuan pendidikan yang masih menggunakan Kurikulum 2013. Satuan pendidikan di daerah nontertinggal memiliki peningkatan skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan di daerah tertinggal, khususnya pada peningkatan skor literasi yang mencapai hampir dua kali lipat. Untuk literasi, perbedaan peningkatan skor antara satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 adalah sebesar 3–4 poin di daerah tertinggal, dan 3–6 poin di daerah nontertinggal. Sedangkan untuk numerasi, selisih peningkatan skor antara pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 adalah sekitar 2–4 poin di daerah tertinggal dan 3–6 poin di daerah nontertinggal (Gambar 3.17).

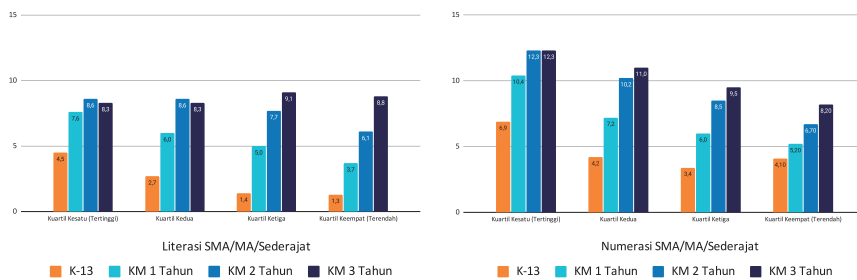


Gambar 3.18 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMA/MA/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi Sekolah.

Kondisi peningkatan capaian skor literasi dan numerasi berdasarkan status sosial ekonomi juga masih selaras dengan pola umum. Satuan

pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka cenderung memiliki skor literasi numerasi yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013. Untuk capaian belajar literasi, satuan pendidikan dari kelompok sosial ekonomi menengah memiliki skor sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok atas, khususnya satuan pendidikan yang telah menggunakan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun, dengan peningkatan skor sebesar 8,9 poin. Sementara untuk satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama dua atau satu tahun, polanya menunjukkan bahwa kelompok sosial ekonomi atas memiliki peningkatan lebih tinggi. Satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 memiliki peningkatan skor literasi paling rendah, bahkan pada kelompok sosial ekonomi bawah hanya mencapai 0,99 poin (Gambar 3.18).

Peningkatan skor numerasi cenderung lebih baik dibandingkan literasi, namun masih dengan mengikuti pola yang sama, bahwa satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka lebih lama cenderung memiliki peningkatan skor numerasi lebih tinggi. Peningkatan skor numerasi paling tinggi dialami oleh satuan pendidikan pada kelompok sosial ekonomi menengah, terutama pada satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun, yaitu sebesar 10,75 poin.



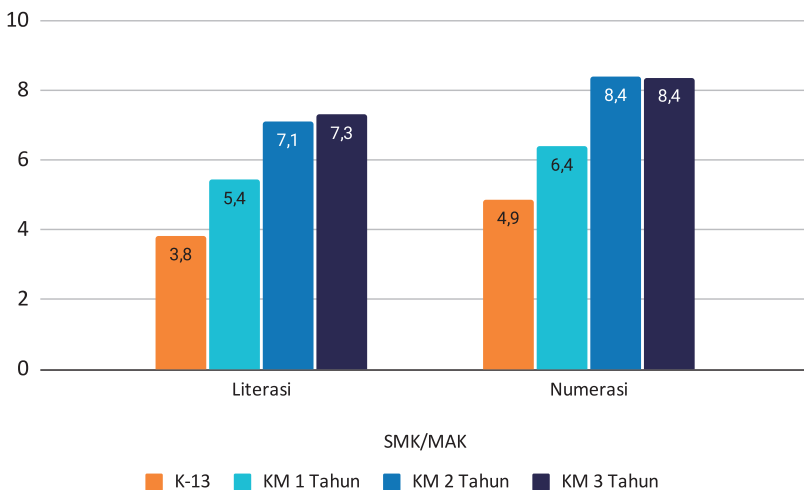
Gambar 3.19 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMA/MA/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Kelompok Peringkat Hasil Belajar Literasi dan Numerasi pada AN 2021.

Bila dianalisis lebih lanjut berdasarkan kelompok peringkat hasil belajar, maka kecenderungan umum tetap berlaku, yakni satuan pendidikan yang telah menjalankan Kurikulum Merdeka lebih lama di semua kuartil cenderung memiliki peningkatan skor lebih besar. Hal itu terjadi baik pada peningkatan skor literasi maupun numerasi. Namun, jika dibandingkan antarkuartil, terlihat bahwa kecenderungan umumnya adalah kuartil teratas memiliki

peningkatan skor lebih tinggi dibandingkan kuartil berikutnya, baik pada peningkatan skor literasi maupun numerasi. Pola yang sedikit berbeda terjadi pada peningkatan skor literasi di kelompok kuartil kedua, di mana pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021 memiliki peningkatan skor literasi sedikit lebih rendah dibandingkan kuartil ketiga, yakni 8,45 poin berbanding 8,25 poin. Begitu pula pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013, peningkatan skor literasi kuartil terbawah sedikit lebih besar dibandingkan kuartil ketiga—hal serupa terjadi pada peningkatan skor numerasi (Gambar 3.19).

3.3.4 Perubahan Kualitas Hasil Belajar pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat

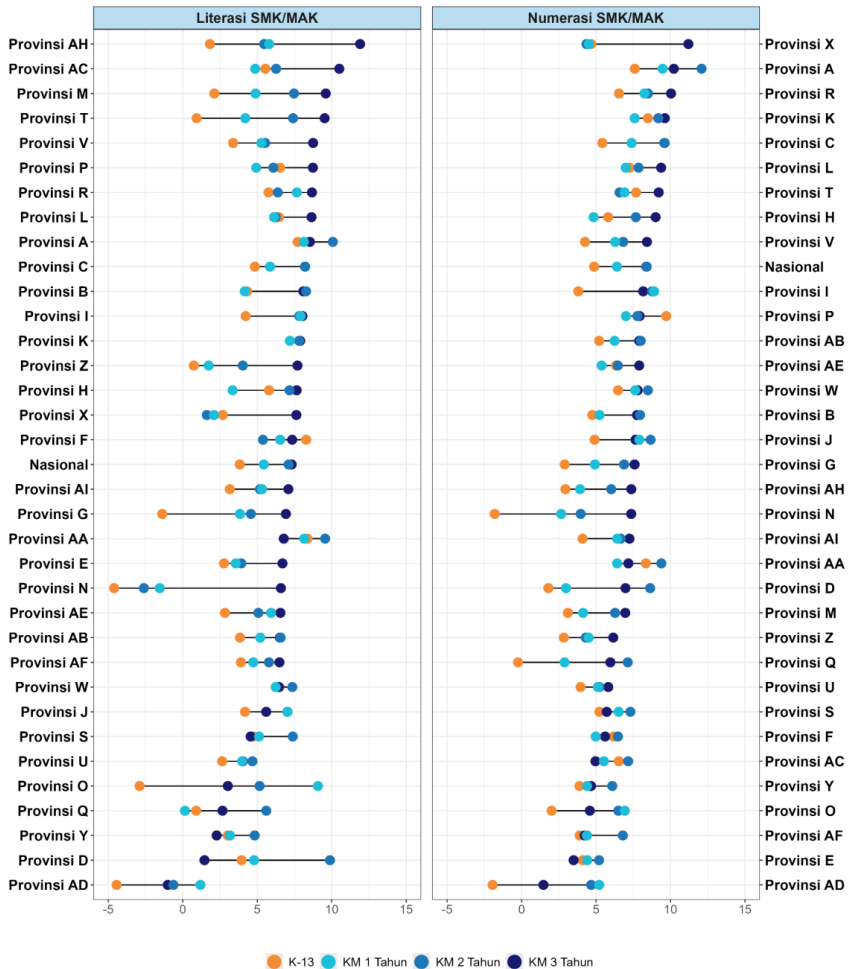
Perubahan capaian hasil belajar yang diukur melalui AN pada jenjang SMK/ sederajat memiliki pola peningkatan yang sama, namun besar peningkatan skornya cenderung lebih rendah dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Secara umum, satuan pendidikan SMK/ sederajat yang mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka memiliki peningkatan skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang masih menggunakan Kurikulum 2013. Satuan pendidikan SMK/ sederajat yang telah menjalankan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun memiliki skor peningkatan sebesar 7,3 poin (dalam dalam 0-100), sedangkan peningkatan terendah dialami oleh satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013, yakni sebesar 3,8 poin. Selisih perbedaan peningkatan skor literasi antara satuan pendidikan SMK/ sederajat yang menjalankan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 sebesar 2–3 poin (Gambar 3.20).



Gambar 3.20 Perubahan Rata-rata Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMK/MAK/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum.

Untuk numerasi, peningkatan skornya sedikit lebih tinggi dibandingkan literasi. Namun, peningkatan skor paling tinggi, yaitu sebesar 8,4 poin dialami oleh satuan pendidikan yang telah menjalankan Kurikulum Merdeka selama dua tahun, diikuti satuan pendidikan yang menjalankan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun dan satu tahun. Untuk satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013, peningkatan skor numerasinya adalah 4,9 poin. Selisih peningkatan skor numerasi antara satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 adalah 2–4 poin (Gambar 3.20).

Peningkatan skor literasi pada sebagian besar provinsi menunjukkan pola bahwa satuan pendidikan yang lebih lama menerapkan Kurikulum Merdeka cenderung memiliki peningkatan skor literasi lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang baru menerapkan Kurikulum Merdeka. Namun, terdapat beberapa daerah yang menunjukkan pola sebaliknya, seperti provinsi AA, S, Y, dan D di mana peningkatan skor literasi terendah justru terjadi pada pelaksana Kurikulum Merdeka selama tiga tahun. Selain itu, terdapat provinsi F yang menunjukkan kecenderungan berbeda, di mana pelaksana Kurikulum 2013 memiliki skor literasi tertinggi dibandingkan skor pada pelaksana Kurikulum Merdeka. Selain itu, beberapa provinsi juga menunjukkan penurunan skor literasi, terutama satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013, yaitu pada provinsi G, N, O, dan AD. Kesenjangan peningkatan skor paling tinggi juga terjadi pada tiga provinsi tersebut, di mana selisih kenaikan skor literasi antara satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 mencapai 3–12 poin (Gambar 3.21).

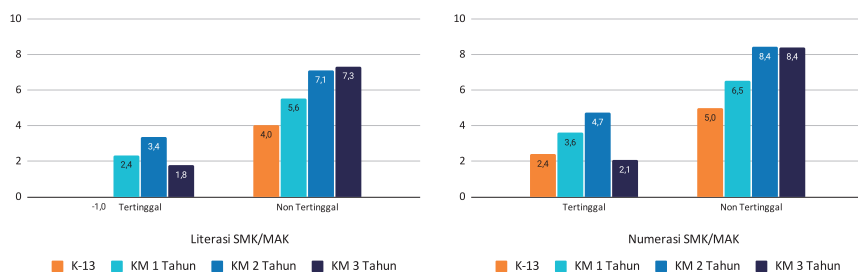


Gambar 3.21 Rata-rata Perubahan Skor Literasi-Numerasi Jenjang SMK/MAK/Sederajat dari AN 2021 ke 2023 Berdasarkan Provinsi.

Pola yang sama juga terlihat pada hasil capaian belajar numerasi, di mana pada sebagian besar daerah, satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun atau dua tahun memiliki peningkatan skor paling tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang masih mengimplementasikan Kurikulum 2013. Pola berbeda terjadi pada provinsi P di mana peningkatan skor numerasi tertinggi justru terjadi pada pelaksana Kurikulum 2013. Selain itu, serupa dengan sebaran peningkatan skor literasi, terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan skor, terutama pada satuan pendidikan

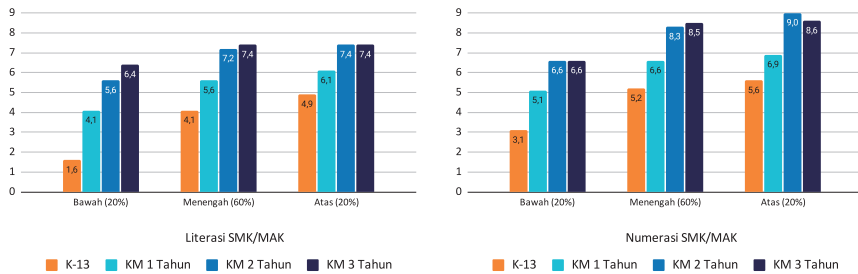
pelaksana Kurikulum 2013, yaitu provinsi N, Q, dan AD. Ketiga provinsi tersebut juga menunjukkan disparitas peningkatan skor numerasi paling tinggi antara pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan selisih sekitar 3–9 poin (Gambar 3.21).

Adanya anomali data, di mana pada beberapa provinsi pelaksana Kurikulum Merdeka selama tiga tahun justru memiliki peningkatan skor literasi dan numerasi rendah, dapat disebabkan oleh fokus pembelajaran di SMK yang menitikberatkan pada penyiapan peserta didik untuk memiliki keterampilan praktis agar siap untuk bekerja. Hal ini membuat proses pembelajaran lebih didominasi oleh penumbuhan kecakapan implementatif, misalnya melalui praktik kerja lapangan, magang, program *teaching factory*, maupun berbagai kerja sama dengan dunia kerja.



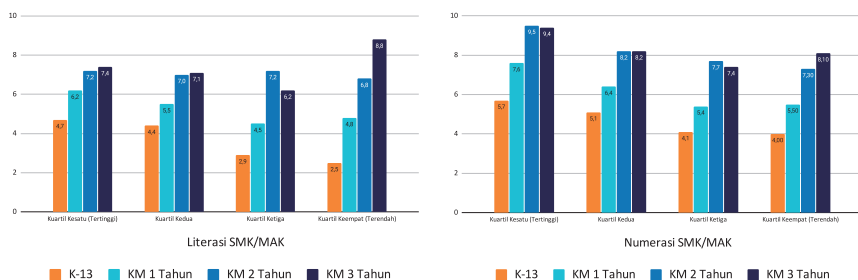
Gambar 3.22 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMK/MAK/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Jenis Wilayah.

Dilihat berdasarkan karakteristik daerah, yaitu daerah tertinggal dan nontertinggal, peningkatan skor literasi dan numerasi pada jenjang SMK/ sederajat memiliki pola yang berbeda. Secara umum, peningkatan skor literasi dan numerasi untuk daerah tertinggal berada di bawah daerah nontertinggal, berkisar antara dua sampai tiga kali lipat. Pada daerah tertinggal, satuan pendidikan SMK yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun justru memiliki peningkatan skor literasi dan numerasi yang lebih rendah dibandingkan satuan pendidikan yang baru melaksanakan selama dua tahun dan tiga tahun. Selain itu, terdapat penurunan skor literasi pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 di daerah tertinggal, yakni sebesar -1,03 poin. Kondisi berbeda terjadi di daerah nontertinggal dengan pola peningkatan skor literasi maupun numerasi yang lebih konsisten, di mana satuan pendidikan yang lebih lama menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki peningkatan skor lebih tinggi (Gambar 3.22).



Gambar 3.23 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMK/MAK/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi Satuan Pendidikan.

Pola umum juga terjadi jika dilihat dari kelompok sosial ekonomi, di mana kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi memiliki peningkatan skor lebih tinggi dibandingkan kelompok sosial ekonomi lainnya. Jika dilihat berdasarkan peningkatannya, satuan pendidikan yang lebih lama menggunakan Kurikulum Merdeka dari tiga kelompok sosial ekonomi cenderung mendapatkan peningkatan skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi. Namun, kondisi ini dikecualikan pada kelompok sosial ekonomi atas, di mana pelaksana Kurikulum Merdeka selama tiga tahun memiliki peningkatan skor literasi numerasi yang sedikit lebih rendah dibandingkan pelaksana Kurikulum Merdeka selama dua tahun. Khusus untuk peningkatan pada skor literasi, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 dari kelompok sosial ekonomi bawah memiliki peningkatan terendah, yaitu sebesar 1,65 poin (Gambar 3.23).



Gambar 3.24 Perubahan Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi SMK/MAK/Sederajat dari AN 2021 ke AN 2023 Berdasarkan Kelompok Peringkat Hasil Belajar Literasi dan Numerasi pada AN 2021.

Pola umum di mana peningkatan skor literasi numerasi paling tinggi terjadi pada satuan pendidikan yang lebih awal mengimplementasikan Kurikulum

Merdeka terjadi pula pada SMK/ sederajat jika berdasarkan kelompok peringkat hasil belajarnya. Pola yang sedikit berbeda dari kecenderungan umum tersebut terjadi pada kuartil ketiga untuk peningkatan skor literasi dan kuartil pertama untuk numerasi, di mana peningkatan skor pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021 sedikit lebih rendah dibandingkan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2022.

Perbandingan antarkuartil peringkat hasil belajar juga memiliki pola serupa, di mana umumnya kuartil teratas memiliki peningkatan skor literasi dan numerasi tertinggi, lalu diikuti kelompok kuartil berikutnya. Kecenderungan yang berbeda terlihat pada kuartil terbawah untuk peningkatan capaian literasi, di mana pelaksana Kurikulum Merdeka sejak 2021 pada kuartil keempat memiliki peningkatan skor terbesar, baru diikuti oleh kuartil pertama, ketiga, dan kedua. Pola tersebut juga terjadi pada peningkatan skor numerasi, di mana kuartil terbawah memiliki skor paling tinggi, kemudian disusul oleh kuartil ketiga, kuartil pertama, kemudian kuartil kedua (Gambar 3.24).

4.1 Sebaran Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka

Selama tiga tahun sejak 2021, Kurikulum Merdeka telah diterapkan secara luas oleh lebih dari 70% satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia (pada 2024, telah mencapai 84% satuan pendidikan). Penerapan kurikulum ini telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka juga membuatnya direspons dengan cukup baik oleh berbagai satuan pendidikan dari ragam kategori wilayah, baik wilayah kota maupun kabupaten, serta daerah nontertinggal maupun tertinggal. Data yang disajikan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka juga diterapkan dengan cukup luas di kabupaten/kota kecil maupun daerah tertinggal. Meskipun demikian, terdapat variasi tingkat penerapan di berbagai provinsi dan kelompok wilayah ini. Sebaran penerapan Kurikulum Merdeka sedikit lebih dominan di provinsi-provinsi di kawasan barat Indonesia dibandingkan kawasan timur. Wilayah barat, khususnya Pulau Jawa, merupakan kawasan yang memiliki tingkat penerapan paling tinggi. Sedangkan di wilayah timur, terutama Papua dan Maluku, serta daerah-daerah tertinggal menjadi yang paling rendah tingkat penerapannya.

Adanya kesenjangan geografis dalam sebaran penerapan kurikulum baru ini bukan tanpa alasan. Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa faktor geografis timur dan barat Indonesia masih menjadi sumber ketimpangan baik secara ekonomi maupun pendidikan (Azizah, 2015; Sihombing, 2019; dan Kurniawan dkk., 2019). Dalam konteks penerapan kurikulum, kesenjangan geografis ini dapat diatribusikan kepada kesenjangan digital yang memang masih terjadi lintas provinsi di Indonesia (Kartiasih dkk., 2022). Hal ini mengingat proses pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka, serta pelatihan tentang bagaimana kurikulum baru ini diterapkan dilakukan melalui sarana digital Platform Merdeka Mengajar (PMM). Tidak semua kepala

sekolah dan guru memiliki perangkat digital untuk mengakses PMM. Jika pun ada, sinyal internet yang kurang stabil sering kali mengganggu kualitas akses pada platform tersebut. Pada wilayah-wilayah ini, pendampingan secara langsung masih menjadi pendekatan yang diperlukan.

Selain akses pada informasi dan teknologi, faktor lain yang juga memengaruhi adalah kesiapan satuan pendidikan itu sendiri. Kebijakan pemerintah terkait penerapan Kurikulum Merdeka secara sukarela berdasarkan kesiapan satuan pendidikan memiliki pengaruh terhadap keputusan satuan pendidikan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka atau tidak. Suatu kebijakan yang mengharuskan (*mandatory*) cenderung mendapatkan respons yang lebih kuat dibandingkan kebijakan yang bersifat sukarela (*voluntary*) (Aragon-Correa dkk., 2020). Meski kurikulum ini pada dasarnya dapat diterapkan untuk semua kondisi satuan pendidikan, dalam berbagai sosialisasinya, pemerintah memang mengimbau kepada dinas pendidikan di seluruh wilayah agar tidak memaksa satuan pendidikan mereka menerapkan kurikulum ini. Satuan pendidikan di wilayah tertinggal dan wilayah timur merasa memerlukan waktu untuk mempelajari dan memahami kurikulum baru tersebut secara lebih mendalam. Bahkan, berdasarkan studi kualitatif yang kami lakukan, karena terbatasnya akses informasi, di sebagian wilayah tersebut terdapat sejumlah satuan pendidikan yang belum lama mengenal dan baru menerapkan Kurikulum 2013.

4.2 Profil Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka diterapkan oleh satuan pendidikan dari berbagai latar belakang, baik status satuan pendidikan, tingkat sosial ekonomi, maupun kualitas hasil belajar. Salah satu kelompok yang dapat dicermati di sini adalah kelompok status satuan pendidikan. Berdasarkan status, meskipun terdapat proporsi yang cukup signifikan dari satuan pendidikan swasta yang menerapkan kurikulum baru ini, proporsi satuan pendidikan negeri masih tetap dominan pada semua jenjang. Faktor utamanya dapat dikaitkan dengan besarnya peran dinas pendidikan dalam mendorong implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan yang ada di bawah kewenangannya. Pengelolaan pendidikan Indonesia setelah desentralisasi memang memperlihatkan peran yang kuat dari dinas pendidikan (Edwards dkk., 2023). Satuan pendidikan negeri paling banyak merespons karena secara struktural menjadi bagian dari dinas pendidikan. Berdasarkan studi

kualitatif, sejumlah dinas pendidikan bahkan mewajibkan satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka, meskipun pemerintah menetapkan kebijakan kesukarelaan sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Akan tetapi, karena satuan pendidikan negeri berada di bawah kewenangan dinas pendidikan masing-masing daerah, maka mereka merasa lebih terikat dengan kebijakan dinas pendidikan tersebut.

Sementara itu, dari aspek latar belakang kualitas hasil belajar, studi ini juga menemukan keragaman kualitas awal satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sebelum menerapkan kurikulum baru. Hasil AN tahun 2021 menunjukkan satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka lebih awal (tahun 2021) memiliki kualitas hasil belajar awal yang lebih baik dibandingkan yang menerapkan lebih belakangan (tahun 2022 dan 2023). Selain itu, terdapat kecenderungan umum bahwa satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka memiliki kondisi hasil belajar awal yang lebih baik dibandingkan dengan satuan pendidikan pengguna Kurikulum 2013. Hal itu dapat dikaitkan dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan sebelum berkomitmen melaksanakan kurikulum baru.

Terdapat satu prinsip utama bahwa kurikulum ini diterapkan secara sukarela sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Kesiapan ini terkait dengan kapasitas guru, kesesuaian praktik pembelajaran yang telah berlangsung dengan kurikulum, maupun keyakinan pemimpin satuan pendidikan itu sendiri akan kemampuan organisasinya beradaptasi dengan perubahan. Untuk pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan yang merupakan pengguna pertama Kurikulum Merdeka, kesiapan tersebut dilihat dari kualitas kepemimpinan kepala sekolahnya saat dilakukan seleksi pelaksana program. Sedangkan bagi pelaksana Kurikulum Merdeka secara mandiri, kesiapan dianalisis secara mandiri melalui asesmen diri yang dilakukan kepala satuan pendidikan ketika melakukan pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka. Berdasarkan analisis hasil AN tahun 2021, atau periode sebelum Kurikulum Merdeka secara mandiri diterapkan, berbagai indikator kesiapan tersebut secara kumulatif tercermin dari kinerja hasil belajar sebelum menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal itu menunjukkan skenario pemerintah bekerja, di mana satuan pendidikan yang secara sukarela memilih menerapkan Kurikulum Merdeka mendasarkan pilihannya pada penilaian terhadap kemampuan dirinya. Sebagaimana banyak riset telah menunjukkan, kualitas hasil belajar peserta didik memiliki kaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kapasitas guru, strategi

pembelajaran, dan kepemimpinan sekolah (Day dkk., 2016; Shen dkk., 2020; Blomeke dkk., 2022).

Meski secara umum merupakan satuan pendidikan yang relatif lebih “berkualitas” sebagaimana terlihat dari hasil belajar awal, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Keragaman kondisi sosial ekonomi ini dikonfirmasi dengan fakta yang sejalan dengan teori dan fenomena internasional (Von Stumm dkk., 2020; OECD, 2023), bahwa kondisi status sosial ekonomi masih berjalan linear dengan hasil belajar peserta didik. Satuan pendidikan dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi memiliki hasil belajar awal yang lebih baik dibandingkan satuan pendidikan dari kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah. Hal itu menunjukkan bahwa satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka tersebar merata pada semua lapisan sosial ekonomi dan tidak didominasi oleh kelompok sekolah elite semata. Akan tetapi, karena faktor kesiapan, seperti halnya pola yang berlaku secara nasional, satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka memiliki posisi awal skor literasi dan numerasi yang lebih baik dibandingkan satuan pelaksana Kurikulum 2013 pada semua lapisan sosial ekonomi.

Hasil analisis untuk kelompok peringkat performa hasil belajar pun memiliki pola selaras. Satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka secara merata terwakili dalam empat kuartil peringkat hasil belajar di mana kuartil yang makin tinggi memiliki skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi. Dalam hal perbandingan penerapan kurikulum, seperti halnya pola yang berlaku, pengguna Kurikulum Merdeka memiliki kinerja hasil belajar yang lebih baik sebelum penerapan kurikulum baru dibandingkan pelaksana Kurikulum 2013. Makin awal satuan pendidikan tersebut menerapkan kurikulum baru, maka makin tinggi juga skor awal literasi dan numerasinya. Meskipun demikian, kita perlu melihat apakah penggunaan kurikulum baru ini dapat membuat mereka yang berkinerja paling baik melanjutkan laju kinerjanya menjadi lebih baik lagi atau tidak. Sebaliknya, perlu juga dilihat apakah yang berkinerja paling rendah dapat bangkit mengejar ketertinggalan mereka melalui kurikulum baru ini. Hal ini akan dilihat pada bagian berikutnya dari pembahasan ini.

Variasi dari pola umum terjadi ketika analisis dilakukan berdasarkan provinsi. Pada beberapa provinsi dan terutama untuk hasil numerasi SMP dan SMK, terdapat fakta di mana pada beberapa provinsi kondisi awal satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 lebih baik dibandingkan pengguna Kurikulum Merdeka. Penjelasan untuk hal ini dapat dikaitkan dengan dua faktor. *Pertama*, faktor respons pemerintah daerah. Tidak semua

dinas pendidikan menerapkan prinsip kesukarelaan dan kesiapan dalam penerapan Kurikulum Merdeka sesuai kebijakan pemerintah pusat. Hal itu karena karakteristik dari praktik umum sistem desentralisasi pendidikan di Indonesia di mana pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang tidak selalu selaras dengan kebijakan pemerintah pusat (Zamjani, 2022; Edwards dkk., 2023). Dalam kaitan ini, terdapat sejumlah dinas pendidikan yang meminta semua satuan pendidikan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka apapun kondisinya. Akibatnya, beberapa satuan pendidikan yang pada dasarnya “belum siap”, ikut mendaftar Kurikulum Merdeka karena mengikuti imbauan, sedangkan satuan pendidikan yang semestinya lebih siap enggan mendaftar karena secara subjektif merasa belum siap. Satuan pendidikan yang disebutkan terakhir ini umumnya berasal dari lembaga swasta.

Penjelasan di atas terkait dengan faktor *kedua*, yaitu faktor respons satuan pendidikan. Pada beberapa daerah yang memang tidak diberikan imbauan khusus oleh pemda, satuan pendidikan menentukan secara mandiri pilihannya, bahkan tanpa terikat oleh hasil asesmen diri. Satuan pendidikan dapat memilih sesuai pertimbangan subjektif mereka, tanpa harus mempertimbangkan kesiapan berdasarkan hasil asesmen diri. Akibatnya, satuan pendidikan dengan kinerja hasil belajar relatif lebih baik boleh jadi tidak memilih menerapkan Kurikulum Merdeka dan begitu pula sebaliknya.

4.3 Perubahan Pascapenerapan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dirancang untuk membantu guru dan peserta didik agar mampu belajar dan meningkatkan kompetensi dirinya. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka dimulai sejak tahun 2021 pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan—ketika itu disebut kurikulum prototipe, kemudian sejak tahun 2022 dan 2023 dibuka kesempatan kepada satuan pendidikan lainnya untuk mulai menerapkan kurikulum ini secara sukarela melalui pendaftaran. Satuan pendidikan yang mendaftar lalu mengisi evaluasi diri dan dapat memilih implementasi sesuai kesiapan mereka. Pada bagian sebelumnya, telah dibahas bagaimana kesiapan ini tercermin dalam hasil belajar peserta didik sebelum kurikulum tersebut diterapkan. Satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka terlihat memiliki capaian belajar awal yang lebih baik dibanding satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013. Artinya, kualitas satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka sejak awal dapat dikatakan memang lebih baik dibanding pelaksana kurikulum lama.

Pertanyaannya, apakah kurikulum baru ini mampu mendorong satuan pendidikan tersebut untuk mempertahankan kinerjanya, berkinerja lebih baik lagi, atau justru menurun dari sebelumnya, serta dibandingkan dengan satuan pendidikan lain yang masih menggunakan kurikulum lama. Sejumlah riset menemukan bahwa reformasi kurikulum di banyak tempat biasanya berasosiasi dengan beragam kompleksitas yang dihadapi, seperti tuntutan pengajaran berbagai kompetensi baru dan tambahan beban administrasi, sehingga memicu stres dan *burnout* (Germeten, 2011; Tikkanen dkk., 2020). Oleh karena itu, wajar jika dampak penerapan kurikulum baru terhadap perubahan hasil belajar peserta didik tidak segera terlihat (Pritchett dan Beatty, 2015; Cunningham, 2018). Akan tetapi, kurikulum yang didesain lebih sederhana, fokus pada pembelajaran kompetensi tertentu, dan memberi otonomi yang besar kepada guru, biasanya memiliki dampak langsung terhadap pembelajaran.

Reformasi kurikulum pendidikan dasar di Finlandia sejak 2014 yang fokus pada pengajaran tujuh kompetensi transversal dan penguatan kapasitas guru, misalnya, berhasil mendorong kemajuan pembelajaran kompetensi abad ke-21 di sekolah-sekolah (Lavonen, 2020). Selain itu, studi RISE juga merekam dampak reformasi kurikulum di Tanzania yang berfokus pada pengajaran literasi dan numerasi peserta didik kelas 1 dan 2 dengan menghilangkan beberapa mata pelajaran lain. Hasilnya, terjadi peningkatan sebesar 0,2 standar deviasi dalam skor ujian Bahasa Kiswahili dan Matematika hanya satu tahun setelah penerapan kebijakan tersebut (Rodriguez-Segura & Mbiti, 2022). Seperti halnya di Finlandia dan Tanzania, reformasi kurikulum di Indonesia juga menekankan pada penyederhanaan materi dan penguatan karakter abad ke-21. Efeknya terhadap pembelajaran dapat kita lihat dari perubahan capaian hasil AN pascapenerapan kurikulum baru tersebut.

Secara nasional, efek positif penerapan Kurikulum Merdeka ditunjukkan oleh peningkatan hasil belajar literasi dan numerasi yang lebih tinggi pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum ini dibandingkan yang masih menggunakan Kurikulum 2013.

Hasil AN pada 2023 telah menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara konsisten menunjukkan kemajuan belajar yang lebih baik pada semua jenjang dan kelompok satuan pendidikan. Selain itu, satuan pendidikan yang lebih lama menerapkan Kurikulum Merdeka cenderung memiliki peningkatan skor yang lebih tinggi

dibandingkan satuan pendidikan yang menerapkannya lebih belakangan. Perbandingan kemajuan hasil belajar antara pelaksana Kurikulum Merdeka yang pertama kali menerapkan pada 2021 dengan pelaksana Kurikulum 2013 untuk numerasi misalnya, selisihnya mencapai 4,3 poin pada SD/ sederajat, 6,3 poin pada SMP/ sederajat, 5,7 poin pada SMA/ sederajat, dan 3,5 poin pada SMK/ sederajat. Meskipun demikian, terdapat beberapa anomali di sebagian kecil provinsi yang dapat diakibatkan dari adanya variasi kebijakan pemerintah daerah maupun akses pada sumber-sumber belajar dari satuan pendidikan yang ada di sejumlah wilayah, sehingga sulit memahami dan menerapkan kurikulum secara lebih optimal.

Kemajuan belajar yang lebih baik yang tergambar melalui AN literasi dan numerasi pada satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka dapat dijelaskan melalui dua hal. *Pertama*, filosofi dan karakteristik Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penyederhanaan kompleksitas pembelajaran. Dalam desain kurikulum, makin sederhana, maka makin baik (*less is more*). Hal ini membantu guru dan peserta didik untuk berfokus pada perbaikan pembelajaran. Kurikulum yang lebih sederhana memberi kesempatan bagi peserta didik mendalami keterampilan inti berulang-ulang dan bagi guru untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal (Lyons, 2021). Tidak seperti kurikulum sebelumnya yang cenderung padat, materi dalam Kurikulum Merdeka dikurangi, sehingga guru diharapkan dapat leluasa memperdalam pembelajaran dan mengasah keterampilan peserta didik dalam menganalisis dan memecahkan persoalan-persoalan yang kontekstual. Hal itu juga sangat relevan dengan kebijakan AN yang menilai keterampilan berpikir aras tinggi.

Kedua, pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi strategi pembelajaran kunci dari Kurikulum Merdeka membuat guru menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik, sehingga setiap peserta didik dapat mengejar ketertinggalannya. Guru didorong untuk lebih profesional dalam menjalankan perannya, memantau perkembangan belajar peserta didik melalui asesmen formatif dan melakukan refleksi pembelajaran. Hasil asesmen dan refleksi tersebut menjadi dasar bagi guru untuk menyesuaikan dan memperbaiki proses dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Dengan cara ini diharapkan tidak ada peserta didik yang tertinggal.

Kurikulum Merdeka mendorong resiliensi satuan pendidikan dari kelompok yang rentan mengalami ketertinggalan belajar.

Di balik narasi utama tentang manfaat Kurikulum Merdeka yang dirasakan secara luas oleh satuan pendidikan dari semua jenjang, manfaat sesungguhnya dari penerapan kurikulum baru ini dirasakan oleh mereka yang paling rentan mengalami ketertinggalan belajar. Studi terkait penerapan kurikulum darurat yang dilakukan oleh INOVASI juga menemukan hal serupa. Kurikulum 2013 yang disederhanakan terbukti memitigasi dampak kehilangan belajar yang lebih besar pada kelompok rentan, seperti anak dari keluarga miskin, orang tua berpendidikan rendah, dan masih menggunakan bahasa Ibu dalam belajar (Berry dkk., 2023). Seperti diketahui, tujuan dari penerapan Kurikulum Merdeka adalah membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik. Di masa lalu, guru-guru cenderung mengejar tagihan pengajaran materi yang padat, tanpa peduli apakah setiap peserta didik mampu mencerna pembelajaran atau tidak. Dengan cara ini, peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang lebih lambat dan keterbatasan kognitif dalam memahami materi sering kali tertinggal. Peserta didik semacam ini biasanya memiliki latar belakang kondisi sosial ekonomi, kecukupan fasilitas, dan keadaan geografis yang lebih menantang. Studi ini menemukan bahwa manfaat Kurikulum Merdeka secara lebih nyata didapatkan oleh kelompok-kelompok ini.

Jika kita membandingkan capaian satuan pendidikan di wilayah tertinggal dan nontertinggal, misalnya, sangat wajar jika daerah-daerah nontertinggal memiliki kemajuan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan wilayah tertinggal. Hal ini dapat dikaitkan dengan dukungan sumber daya dan fasilitas yang lebih baik pada daerah nontertinggal. Akan tetapi, jika melihat di dalam wilayah tertinggal sendiri, kita menemukan bahwa Kurikulum Merdeka sangat membantu satuan pendidikan penggunanya untuk belajar jauh lebih baik dibandingkan pengguna Kurikulum 2013. Pada jenjang SMA/ sederajat di daerah tertinggal misalnya, terlihat kesenjangan yang cukup besar antara pengguna Kurikulum Merdeka yang mengalami kemajuan belajar literasi sebesar 4,6 poin dibandingkan pengguna Kurikulum 2013 yang hampir tidak mengalami kemajuan (0,25 poin). Hal ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka dengan karakteristiknya yang lebih fleksibel sangat relevan diterapkan di wilayah tertinggal, di mana para peserta didik yang lebih rentan mengalami ketertinggalan belajar berada.

Keandalan Kurikulum Merdeka dalam mendukung kemajuan belajar yang lebih baik bagi peserta didik juga terlihat dalam konteks perbandingan antarkelompok sosial ekonomi. Pada ketiga lapisan kelompok sosial ekonomi (atas, tengah, dan bawah), secara umum satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dari semua jenjang pendidikan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pelaksana Kurikulum 2013. Akan tetapi, seperti halnya pada konteks wilayah tertinggal, yang paling banyak memperoleh manfaat dari penerapan Kurikulum Merdeka adalah mereka yang paling rentan. Dalam hal ini, satuan pendidikan pada kelompok sosial ekonomi lapisan paling bawah. Kelompok sosial ekonomi terbawah rentan mengalami ketertinggalan belajar karena akses pada fasilitas belajar yang lebih terbatas. Akan tetapi, hasil analisis membuktikan justru kelompok ini lebih menunjukkan ketangguhan.

Pada jenjang SMP/ sederajat, misalnya, kesenjangan kemajuan antara satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dan pelaksana Kurikulum 2013 pada kelompok 20% terbawah terlihat sangat nyata. Satuan pendidikan pengguna Kurikulum Merdeka dari kelompok sosial ekonomi terbawah memiliki kemajuan belajar paling tinggi pada literasi (13,8) dibandingkan satuan pendidikan dari kelompok sosial ekonomi menengah (10,4) maupun atas (9,8). Sebaliknya, satuan pendidikan pengguna Kurikulum 2013 dari kelompok sosial ekonomi terbawah memiliki kemajuan belajar paling rendah (3,8) dibandingkan kelompok ekonomi menengah (5,7) dan atas (6,3). Jika perbandingan dibuat antara pelaksana Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 pada kelompok sosial ekonomi terbawah, maka terdapat selisih kemajuan belajar sebesar 10 poin. Sedangkan pada kelompok 20% teratas, selisih kemajuan belajarnya “hanya” 3,5 poin. Pola ini juga terjadi pada hasil belajar numerasi, meski dengan angka yang sedikit lebih rendah.

Kurikulum Merdeka membantu mengatasi kesenjangan hasil belajar antarsatuan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar.

Resiliensi yang muncul dari kelompok-kelompok rentan sebagai manfaat nyata yang diperoleh dari penerapan Kurikulum Merdeka sangat terkait dengan upaya mengatasi kesenjangan hasil belajar antarpeserta didik maupun antarsatuan pendidikan. Temuan lain yang cukup menjanjikan terkait berkurangnya kesenjangan antarsatuan pendidikan terlihat dari hasil analisis pada kelompok peringkat hasil belajar, khususnya pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Pada satuan SD/ sederajat, baik untuk skor literasi maupun

numerasi, peningkatan tertinggi justru terjadi pada kuartil terbawah, disusul oleh kuartil berikutnya. Kuartil teratas atau kelompok yang memiliki performa akademik terbaik justru mengalami peningkatan skor paling rendah. Pola yang sama terdapat pada peningkatan skor literasi di jenjang SMP/ sederajat. Peningkatan skor tertinggi pada kuartil terbawah pada jangka panjang dapat mempersempit kesenjangan capaian hasil belajar, sehingga dapat mendekati capaian skor yang dimiliki oleh kuartil teratas.

Peningkatan skor tertinggi pada kuartil terbawah dapat terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, adanya efek batas atas (*ceiling effect*), di mana peserta didik yang sudah mendapatkan skor dengan kategori 25% teratas sulit untuk meningkatkan skornya lebih besar lagi, karena sudah hampir mencapai nilai maksimal (Taylor, 2010). *Kedua*, peserta didik yang memiliki skor dalam kategori kuartil 25% terbawah memiliki ruang peningkatan yang lebih besar. Berdasarkan teori regresi ke rata-rata, skor yang rendah akan cenderung mendekati rata-rata sehingga dapat mengalami peningkatan cukup besar (Stigler, 1997). *Ketiga*, selain dua penjelasan tersebut, faktor penting lainnya adalah fleksibilitas yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka serta dorongan agar guru memberikan perhatian lebih kepada peserta didik yang tertinggal melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan cara ini, praktik pembelajaran secara alamiah akan mengarah kepada peningkatan kualitas belajar yang lebih merata pada semua peserta didik.



BAB 5

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Implementasi Kurikulum Merdeka diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Indikasi awal dari hasil analisis terhadap data AN 2021 dan perubahannya pada AN 2023 membuktikan bahwa satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki skor awal dan peningkatan skor yang lebih tinggi dibandingkan satuan pendidikan yang bertahan menggunakan Kurikulum 2013. Dengan berfokus pada materi esensial, seperti literasi dan numerasi, serta memberikan fleksibilitas bagi guru untuk mendesain dan menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran menjadi salah satu kelebihan dari kurikulum ini. Penerapan kurikulum baru ini juga terbukti telah membantu meningkatkan resiliensi satuan pendidikan yang tergolong ke dalam kelompok rentan baik secara kewilayahan maupun sosial ekonomi, sehingga tidak tertinggal lebih jauh lagi dibandingkan yang lain. Hal ini pada gilirannya juga akan berdampak pada berkurangnya kesenjangan kualitas hasil belajar antarsatuan pendidikan di Indonesia.

Hasil dari studi ini merekomendasikan perluasan implementasi Kurikulum Merdeka secara lebih bermakna dan berkualitas agar dampaknya dapat dirasakan oleh lebih banyak lagi satuan pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, di antara hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1. Penguatan pemahaman dinas pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan swasta tentang Kurikulum Merdeka sebagai kesempatan untuk merefleksikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran untuk semua peserta didik.**

Penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan perlu terus ditingkatkan, terutama pada satuan pendidikan swasta. Satuan pendidikan swasta memiliki tingkat adopsi Kurikulum Merdeka dan rata-rata hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan satuan pendidikan negeri pada semua jenjang. Dorongan bagi satuan pendidikan swasta

untuk mengadopsi kurikulum baru ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan hasil belajar antara negeri dan swasta. Oleh karena itu, penguatan pemahaman pentingnya adopsi Kurikulum Merdeka perlu ditekankan pada dinas pendidikan maupun penyelenggara satuan pendidikan swasta. Hal ini dapat dilakukan melalui unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di daerah maupun dengan melibatkan berbagai organisasi penyelenggara pendidikan swasta dalam berbagai agenda penguatan Kurikulum Merdeka. Dinas pendidikan sebagai pembina pendidikan di wilayahnya juga perlu merangkul para penyelenggara pendidikan swasta agar dapat segera beradaptasi dengan kurikulum baru ini demi peningkatan kualitas proses dan hasil belajar di satuan pendidikan.

2. Pendampingan khusus bagi satuan pendidikan di daerah tertinggal dan daerah khusus yang kesulitan dalam mendaftar dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Implementasi Kurikulum Merdeka terbukti membantu satuan pendidikan di daerah tertinggal dalam meningkatkan kualitas belajar, namun proporsi satuan pendidikan pelaksanaannya masih sangat terbatas. Hal ini salah satunya karena hambatan dalam hal akses informasi yang diperoleh dan proses pendaftaran yang dilakukan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). Satuan pendidikan di beberapa wilayah tertentu masih terkendala dalam melakukan pendaftaran karena memiliki keterbatasan akses dan informasi. Oleh karena itu, alternatif proses pendaftaran serta sumber belajar yang tersedia secara *offline* menjadi kebutuhan nyata, di samping pendampingan secara langsung apabila diperlukan. Langkah yang diperlukan adalah memetakan sebaran satuan pendidikan yang masih bertahan menerapkan Kurikulum 2013, memahami kesulitan yang dialami, kemudian memberikan pendampingan asimetris. Koordinasi Kemendikbudristek melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah penting untuk proses pendampingan dan advokasi kepada dinas pendidikan terkait.

3. Dukungan ekosistem untuk peningkatan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka agar setiap satuan pendidikan mendapatkan manfaat dari fleksibilitas dan penyesuaian pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik.

Esensi perubahan kurikulum adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan capaian

hasil belajar. Pada beberapa kasus, satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya mendapat manfaat dengan meningkatnya capaian hasil pembelajaran peserta didik mereka. Untuk itu, peningkatan kualitas implementasi kurikulum menjadi penting, sehingga perubahan yang terjadi di satuan pendidikan tidak bersifat superfisial dengan hanya mengubah dokumen kurikulum misalnya, melainkan dapat menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Dari pengalaman beberapa perubahan kurikulum, dukungan ekosistem pembelajaran menjadi penting dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perubahan. Oleh karena itu, diperlukan ekosistem yang mendorong perubahan pembelajaran di tingkat daerah maupun satuan pendidikan. Di tingkat daerah, peran dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan komunitas belajar kepala sekolah dan guru dapat bersinergi dalam mendukung satuan pendidikan bertransformasi menjadi lebih baik. Sementara di tingkat satuan pendidikan, kepemimpinan kepala satuan pendidikan mutlak dibutuhkan guna memandu transformasi yang perlu dilakukan, melalui perencanaan berbasis data yang memanfaatkan data Rapor Pendidikan, meningkatkan kapasitas guru secara berkala melalui pelatihan maupun komunitas belajar, serta rutin mendorong terjadinya refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemendikbudristek melalui UPT di daerah perlu memastikan bahwa pemahaman tentang transformasi satuan pendidikan telah dipahami dengan baik dan mendapat dukungan, baik di tingkat ekosistem daerah maupun satuan pendidikan.



REFERENSI

- Aragon-Correa, J.A., Marcus, A.A., & Vogel, D. (2020). The Effects of Mandatory and Voluntary Regulatory Pressures on Firms' Environmental Strategies: A Review and Recommendations for Future Research. *Academy of Management Annals*, Vol. 14(1). <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0014>
- Azizah, Y. (2015). Socio-Economic Factors on Indonesia Education Disparity. *International Education Studies*, Vol 8(12), 218-229. <http://dx.doi.org/10.5539/ies.v8n12p218>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan 2023*. Badan Pusat Statistik
- Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L., Pradhan, M., & Suryadarma, D. (2021). Schooling progress, learning reversal: Indonesia's learning profiles between 2000 and 2014. *International Journal of Educational Development*, Vol. 85(102436), <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102436>
- Berry, A., Zulfa, A.H., Sprunt, B., Bryant, C., Cloney, D., Sukoco, G.A., Zamjani, I., Spink, J., Octavia, L., Heyward, M., Fearnley-Sander, M., Purba, R.E., Randal, R., & Arsendy, S. (2023). *Bangkit Lebih Kuat: Studi Kesenjangan Pembelajaran*. Jakarta: Kompas. https://pskp.kemdikbud.go.id/clients/detail_buku/333036/bangkit-lebih-kuat-studi-kesenjangan-pembelajaran-
- Blömeke, S., Jentsch, A., Ross, N., Kaiser, G., & König, J. (2022). Opening up the black box: Teacher competence, instructional quality, and students' learning progress. *Learning and Instruction*, Vol 79(101600). <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2022.101600>
- Cunningham, R. (2018). Busy going nowhere: Curriculum reform in Eastern and Southern Africa. *UNICEF Think Piece Series: Curriculum Reform*. UNICEF Eastern and Southern Africa Regional Office, Nairobi. https://www.unicef.org/esaro/EducationThinkPieces_5_CurriculumReform.pdf

- Day, C., Gu, Q., & Sammons, P. (2016). The Impact of Leadership on Student Outcomes: How Successful School Leaders Use Transformational and Instructional Strategies to Make a Difference. *Educational Administration Quarterly*, Vol 52(2). <https://doi.org/10.1177/0013161X15616863>
- Edwards, D.B., Hilarious, M., & Storen, I., (2023). Educational Decentralization from the Central to the Village Level, dalam Edwards, D.B. (ed.) *Rethinking World Bank Influence: Governance Reforms and the Ritual Aid Dance in Indonesia*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429054945>
- Germeten, S. (2011). The new national curriculum in Norway: A change in the role of the principals? *Australian Journal of Education*, 55(1), 14–23. <https://doi.org/10.1177/000494411105500103>.
- Irwin, S. (2008). Data Analysis and Interpretation: Emergent Issues in Linking Quantitative and Qualitative Evidence. Dalam: Hesse-Biber, S.N., & Leavy, P. (eds). *Handbook of Emergent Methods*. New York: The Guilford Press. Hal: 415–436.
- Kartiasih, F., Djalal, N., Wisana, I.D.G.K., & Handayani, D. (2022). Inequalities of Indonesia's regional digital development and its association with socioeconomic characteristics: a spatial and multivariate analysis, *Information Technology for Development*, Vol 29 (2-3), 299–328. <https://doi.org/10.1080/02681102.2022.2110556>
- Kurniawan, H., de Groot, H.L.F., & Mulder, P. Are poor provinces catching-up the rich provinces in Indonesia? (2019). *Regional Science Policy & Practice*, Vol 11 (1), 89–109. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12160>
- Lavonen, J. (2020). Curriculum and Teacher Education Reforms in Finland That Support the Development of Competences for the Twenty-First Century. Dalam: Reimers, F.M. (ed.) *Audacious Education Purposes*. Springer Cham. Hal: 65–80. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41882-3_3
- Lyons, L. (2021). *In Curriculum Design, Less is More*. 27 April 2021. <https://betterlesson.com/blog/curriculum-design>
- OECD. (2020). *Curriculum (Re)Design*. Paris: OECD. [brochure-thematic-reports-on-curriculum-redesign.pdf](https://www.oecd.org/publications/brochure-thematic-reports-on-curriculum-redesign.pdf) (oecd.org)
- OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>

- Pritchett, L. & Beatty, A. (2015). Slow down, you're going too fast: Matching curricula to student skill levels. *International Journal of Educational Development*, Vol. 40(C): 276-288.
- Rodriguez-Segura, D. & Mbiti, I. 2022. Back to the Basics: Curriculum Reform and Student Learning in Tanzania. *RISE Working Paper Series*. 22/099. https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP_2022/099
- Shen, J., Wu, H., Reeves, P., Zheng, Y., Ryan, L., & Anderson, D. (2020). The association between teacher leadership and student achievement: A meta-analysis. *Educational Research Review*, Vol 31(100357). <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100357>
- Sihombing, P.R. (2019). Does The Gap Between East and West Still Exist? A Study of Indonesia's Disparities. *Udayana Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 (1), 1-8. <https://doi.org/10.24843/UJoSSH.2019.v03.i01.p01>
- Stigler, S.M. (1997). Regression towards the mean, historically considered. *Statistical Methods in Medical Research*, Vol. 6(2): 103-114. doi:10.1177/096228029700600202.
- Spink, J., D. Cloney, dan A. Berry. (2022). *Beyond Letters and Numbers: The Covid-19 Pandemic and Foundational Literacy and Numeracy in Indonesia*. INOVASI dan ACER.
- Taylor, T.H. (2010). Ceiling effect. Dalam: Salkind, N.J (ed.) *Encyclopedia of Research Design*. Thousand Oaks: SAGE Publications; pp 133–5.
- Tikkanen, L., Pyhältö, K., Pietarinen, J., & Soini, T. (2020). Lessons learnt from a large-scale curriculum reform: The strategies to enhance development work and reduce reform-related stress. *Journal of Educational Change*, Vol. 21, 543–567. <https://doi.org/10.1007/s10833-019-09363-1>
- Von Stumm, S., Smith-Woolley, E., Ayorech, Z., McMillan, A., Rimfeld, K., Dale, P.S., & Plomin, R. (2020). Predicting educational achievement from genomic measures and socioeconomic status. *Developmental Science*, Vol. 23(3), 1-8. <https://doi.org/10.1111/desc.12925>
- Zamjani, I. (2022). *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia: A Quest for Legitimacy*. Singapore: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-16-6901-9>



PSKP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

